



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2017**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227

Telepon (0293) 491148, 4960766 Faksimil (0293) 491148

laman : dindikpora.temanggungkab.go.id; Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id

Januari 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Temanggung Tahun 2017. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Temanggung.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, untuk percepatan peningkatan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 2 Pebruari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan.....	4
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Pendidikan.....	4
D. Sistematika Penyusunan LKjIP.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Realisasi Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	85
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pendidikan.....	85
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	8
Tabel III.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12
Tabel III.2	Pengukuran Kinerja	13
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	20
Tabel III.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	21
Tabel III.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	24
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	27
Tabel III.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	30
Tabel III.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	32
Tabel III.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	34
Tabel III.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	37
Tabel III.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	38
Tabel III.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	40
Tabel III.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	42
Tabel III.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	44
Tabel III.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	46
Tabel III.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14	49
Tabel III.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	51
Tabel III.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16	52
Tabel III.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	54
Tabel III.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	56
Tabel III.21	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017	74
Tabel III.22	Realisasi Belanja Langsung Setiap Program Tahun 2017	83
Tabel IV.1	% Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2014 – 2017	85

DAFTAR GAMBAR

Grafik III.1	Angka Partisipasi Kasar (%)	57
Grafik III.2	Angka Partisipasi Murni (%)	59
Grafik III.3	Angka Transisi/Angka Melanjutkan (%)	60
Grafik III.4	Angka Putus Sekolah (%)	62
Grafik III.5	Jenjang Akreditasi TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Tahun 2017 (%)	63
Grafik III.6	Jenjang Akreditasi TK/RA/BA Tahun 2014 - 2017 (%)	65
Grafik III.7	Jenjang Akreditasi SD/MI Tahun 2014 - 2017 (%)	66
Grafik III.8	Jenjang Akreditasi SMP/MTs Tahun 2014 - 2017 (%)	67
Grafik III.9	Jenjang Akreditasi SMA/MA Tahun 2014 - 2017 (%)	68
Grafik III.10	Jenjang Akreditasi SMK Tahun 2014 - 2017 (%)	69
Grafik III.11	Pendidik memenuhi Standar Kualifikasi Akademik	70
Grafik III.12	Kondisi Ruang Kelas Baik (%)	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

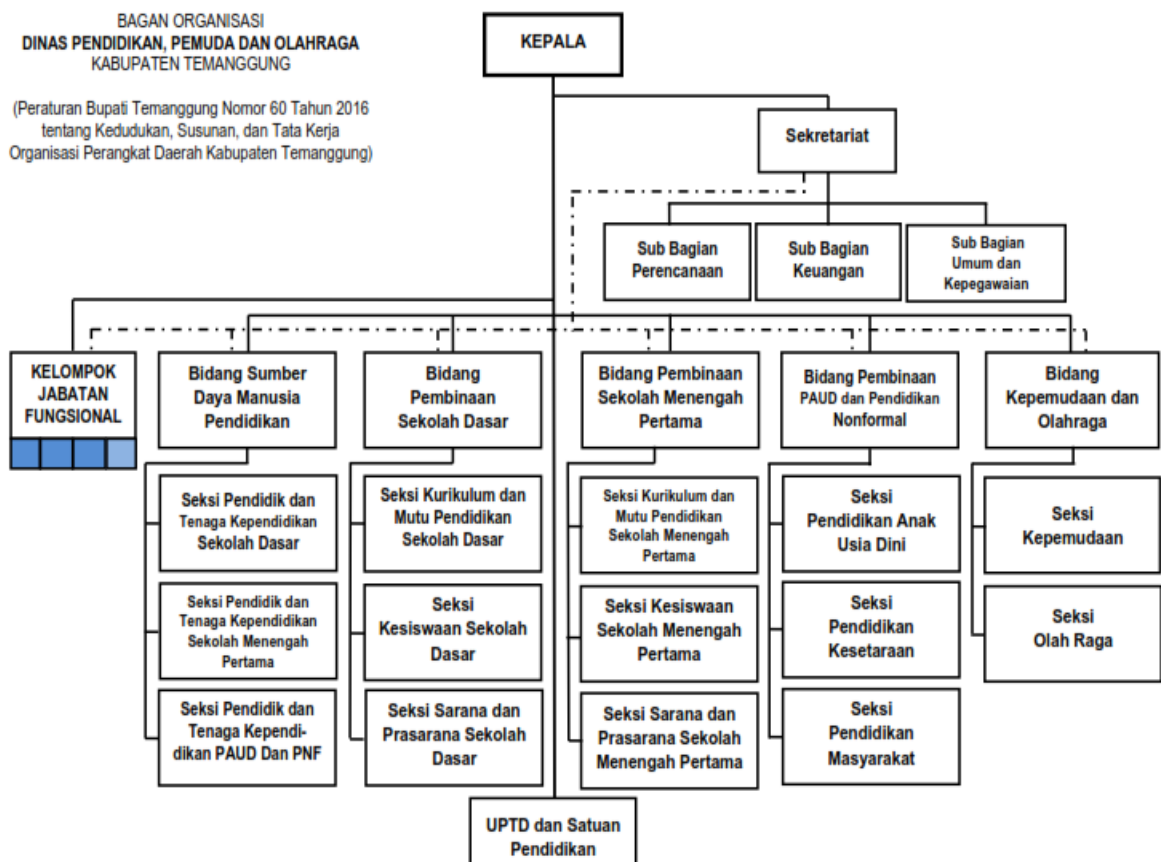
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
4. Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
5. Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;

6. Pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat;
7. Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
9. Pembinaan terhadap UPTD dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas;
10. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung didukung oleh ASN sebanyak 249 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Menurut Ijazah Tertinggi		Menurut Golongan		Menurut Eselon	
	Ijazah	Jumlah	Golongan	Jumlah	Eselon	Jumlah
1	S2	58	Golongan IV	59	Eselon II	1
2	S1	82	Golongan III	99	Eselon III	6
3	D3	13	Golongan II	83	Eselon IV	44
4	D2	0	Golongan I	8	Eselon V	
5	D1	0			Fungsional Khusus	68
6	SMA/ sederajat	88			Fungsional Umum	130
7	SMP/ sederajat	7				
8	SD	1				
JUMLAH		249	JUMLAH	249	JUMLAH	249

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Gedung kantor	22			22
2	Kendaraan roda dua	64			64
3	Kendaraan roda empat	7		2	9
4	Komputer/laptop	61		2	63
5	Printer	53			53
6	Meja kerja eselon	59			59
7	Kursi kerja eselon	66		7	73
8	Meja/kursi tamu	7			7
9	Meja kayu/meja rapat	55			55
10	Kursi rapat	170			170
11	Rak besi	3			3
12	Rak kayu	12			12
13	Lemari kayu	35			35
14	Meja setengah biro	33			33
15	Filing kabinet	40			40
16	Brangkas	3		2	5
17	Lemari besi	4			4
18	Kursi putar	6			6
19	LCD proyektor	2		1	3
20	Genset	1			1
	Jumlah	703	0	14	717

B. Fungsi Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, Visi Bupati Temanggung yaitu **“Terwujudnya Temanggung sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, bermasyarakat agamis, berbudaya dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 6 misi. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung menjalankan misi keempat yaitu **Meningkatkan kualitas pendidikan tanpa meninggalkan kearifan lokal**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa meninggalkan kearifan lokal, serta meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Nomor 050/046 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018, Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung adalah “Pendidikan Temanggung yang aksesibel, berkualitas, berkarakter, dan berkeadilan. Secara singkat Dinas Pendidikan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan budipekerti, tatakrama, nilai budaya, dan keteladanan;
2. Meningkatkan akses layanan pendidikan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan;
4. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Adapun permasalahan utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut:

- 1) Menurunnya budipekerti, tatakrama, nilai budaya, dan keteladanan
- 2) Masalah kualitas pendidikan;

- 3) Masalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- 5) Masalah pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga.

D. Sistematika Penyusunan LKjIP :

Bab I : Pendahuluan;

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja;

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Uraian terbagi menjadi :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup;

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tersebut dalam lampiran.

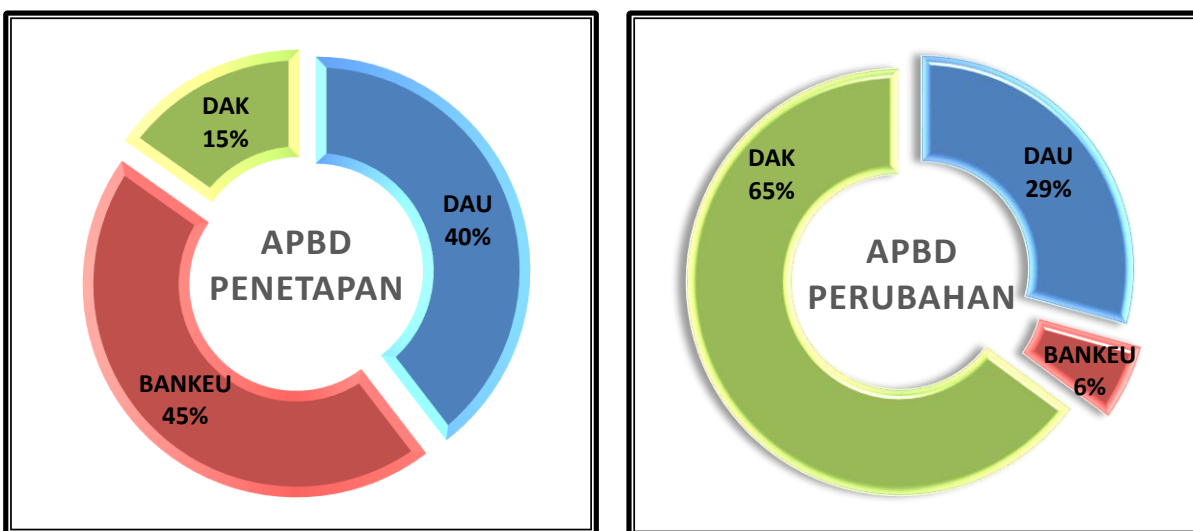
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 11 program, dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp 89.961.289.536,00, yang bersumber dari :

1. Dana Alokasi Umum : Rp 35.615.934.650,00 (39,59%);

- 2. Bantuan Keuangan : Rp 40.664.500.000,00 (45,20%);
- 3. Dana Alokasi Khusus : Rp 13.680.854.886,00 (15,21%).

Anggaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan 12 program, berjumlah Rp 120.716.234.721,00, yang bersumber dari :

- 1. Dana Alokasi Umum : Rp 35.331.074.600,00 (29,27%);
- 2. Bantuan Keuangan : Rp 7.000.000.000,00 (5,80%);
- 3. Dana Alokasi Khusus : Rp 78.385.160.121,00 (64,93%).



Komposisi APBD (Belanja Langsung Tahun 2017)

Tingginya anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada APBD Perubahan disebabkan karena di dalamnya termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP yang mulai Tahun Anggaran 2017 wajib dicatat dalam APBD. Alokasi dana BOS pada APBD Perubahan berjumlah Rp 64.704.305.235 (82,55%) atau setara dengan 53,60% dari seluruh Belanja Langsung.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan Anggaran yang telah disepakati antara kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Tabel II.1 dan Lampiran 1.

Tabel II.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama, Nilai Budaya dan Keteladanan	Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan	Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	86,33
			Tersedianya buku muatan lokal	40,00
			% Pendidik yang disiplin	99,60
			% Siswa nakal	0,00
2	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat atas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (usia 4-6 tahun)	68,63
			APK PAUD (usia 0-6 tahun)	32,52
			% Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)	48,73
			% Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)	49,15
			Rasio siswa per kelas TK/RA	21,00
		Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar	APK SD Sederajat	103,67
			APM SD Sederajat	95,54
			APK SMP Sederajat	96,15
			APM SMP Sederajat	83,78
			Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	100,00
			% Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Dasar	48,67
			Rasio Siswa per Kelas SD/MI	21,14
			Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	31,98
			% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	73,16
			APS Penduduk Usia 7-12 Tahun	993,87
			APS Penduduk Usia 13-15 Tahun	992,62
		Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah	57,06
			APM Pendidikan Menengah	40,05
			Angka Melanjutkan ke Pendidikan Menengah	65,93
			% Partisipasi Anak Perempuan dalam Dikmen	50,93
			Rasio Siswa per Kelas SMA/MA	30,00
			Rasio Siswa per Kelas SMK	32,00
			% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah	45,41
			% Tersedianya Layanan Pendidikan Menengah di Setiap Kecamatan	80,00
			APS Penduduk Usia 16-18 Tahun	439,21
		Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Nonformal	Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun	98,70
			Rata-rata Lama Sekolah	7,17
			% Putus Sekolah Dikdasmen tertampung di PNF	100,00
			% Meningkatnya Jumlah Lembaga PNF	0,91

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	% TK/RA Terakreditasi A	5,83
			% TK/RA Terakreditasi B	42,71
			% TK/RA Terakreditasi C	42,29
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA	94,86
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,422
			% SD/MI Terakreditasi A	4,33
			% SD/MI Terakreditasi B	61,01
			% SD/MI Terakreditasi C	33,22
			% SMP/MTs Terakreditasi A	29,50
			% SMP/MTs Terakreditasi B	40,00
			% SMP/MTs Terakreditasi C	27,62
			Angka Lulusan SD/MI	99,00
			Angka Lulusan SMP/MTs	99,97
			% Siswa SD/MI memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	73,35
			% Siswa SMP/MTs memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	21,23
			(SPM 13) Cakupan Ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100,00
			(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan	75,04
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah	% SMA/MA Terakreditasi A
		% SMA/MA Terakreditasi B		25,93
		% SMA/MA Terakreditasi C		22,22
		% Program Keahlian SMK Terakreditasi A		28,59
		% Program Keahlian SMK Terakreditasi B		47,62
		% Program Keahlian SMK Terakreditasi C		19,05
		Angka Lulusan SMA/MA/SMK		100,00
		% Siswa SMA/MA/SMK Peroleh rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7		57,93
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK		1,56
Meningkatnya kualitas PNF	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	92,56		
4	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpenuhinya kebutuhan pendidik	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA	1:14
			Rasio Siswa per Pendidik SD/MI	1:14
			Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs	1:15
			Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA	1:11
			Rasio Siswa per Pendidik SMK	1:15
			% Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik	44,33
			% Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik	71,16

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			% Pendidik SMA/MA memenuhi standar kualifikasi akademik	91,70	
			% Pendidik SMK memenuhi standar kualifikasi akademik	90,46	
			(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	94,40	
			(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran	83,30	
			(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik	87,50	
			(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik	80,50	
			(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn	72,80	
			(SPM 10) semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	87,80	
			(SPM 11) semua kepala SMP/MTa berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	96,50	
			(SPM 12) semua pengawas Sekolah/Madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	95,92	
			Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik	3,63
				% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik	31,30
		% Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat Pendidik		50,59	
		% Pendidik SMA/MA yg Memiliki Sertifikat Pendidik		45,29	
		% Pendidik SMK yang Memiliki Sertifikat Pendidik		45,29	
		Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	181	
			Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	20	
			Rasio Sekolah per Pengawas	17	
			Besaran Pamong Belajar	5	
		5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik
% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	87,06				
% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	28,19				
% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	87,07				
% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	87,07				
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar	% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik			91,984	
	% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik			92,184	
	% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana			68,792	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	79,952
			(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100,00
			(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	88,16
			(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	79,54
			(SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang guru SD/MI dan SMP/MTs	99,60
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah	% Ruang kelas SMA/MA yang kondisinya Baik	99,71
			% Ruang kelas SMK yang kondisinya Baik	99,39
			% SMA/MA yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	91,816
			% SMK yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	92,776
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	80,072
			% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	83,102
		6	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga
Meningkatnya sarana prasarana kepemudaan dan olahraga	Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga			
Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet olahraga	Besaran kegiatan olahraga			82
	Besaran prestasi olahraga			85
	Besaran prestasi kegiatan kepemudaan			7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018. Rincian capaian kinerja seluruh indikator kinerja tercantum pada Tabel III.2 sebagai berikut :

Tabel III.2
PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.	
1	Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan	Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	%	100		86,33	0	32,82	61,82	86,92	86,92		
		Tersedianya buku muatan local	%	50		40,00	0	20,13	33,85	40,05	80,11		
		% Pendidik yang disiplin	%	99,6		99,60	99,95	99,96	99,98	99,62	100,02		
		% Siswa nakal	%	0		0,00	0,025	0,017	0,028	0,022	99,98		
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (usia 4-6 tahun)	%	69,13	76,4	68,63	67,13	67,66	73,49	73,85	106,83	96,2	
		APK PAUD (usia 0-6 tahun)	%	32,56		32,52	32,41	36,14	38,19	38,21	117,35		
		% Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)	%	48,76		48,73	48,57	48,87	48,55	49,04	100,57		
		% Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)	%	49,17		49,15	48,95	48,03	48,73	49,02	99,70		
		Rasio siswa per kelas TK/RA	%	21		21	20,99	21,01	23,80	21,06	100,27		
3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar	APK SD Sederajat	%	103,7	99,92	103,67	103,8	109,43	111,06	112,13	108,13	111,15	
		APM SD Sederajat	%	95,57	84,52	95,54	95,46	95,49	96,59	98,24	102,79	114,28	
		APK SMP Sederajat	%	96,15	83,61	96,15	96,07	97,17	98,13	98,17	102,10	117,36	
		APM SMP Sederajat	%	83,81	73,7	83,78	83,69	83,73	84,01	87,15	103,98	113,99	
		Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	%	100	86,89	100	97,02	98	97,37	97,49	97,49	112,06	
		% Partisipasi Perempuan dlm Pendidikan Dasar	%	48,6		48,67	48,15	48,25	48,17	48,21	99,20		
		Rasio Siswa per Kelas SD/MI	%	21,16		21,14	21,08	21,1	20,68	20,80	98,31		
		Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	%	32		31,98	31,89	31,61	30,46	30,77	96,17		
		% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	74,42		73,16	68,13	67,62	59,93	60,69	81,56		
		APS Penduduk Usia 7-12 Tahun	‰	993,9		993,87	994,25	994,3	996,04	999,80	100,59		
APS Penduduk Usia 13-15 Tahun	‰	992,65		992,62	993,25	993,28	998,02	996,90	100,43				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.	
4	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah	%	57,16	84,09	57,06	56,73	60,76	65,68	70,90	124,03	89,77	
		APM Pendidikan Menengah	%	40,1	65,81	40,05	40,36	51,09	53,46	58,33	145,45	81,00	
		Angka Melanjutkan ke Pendidikan Menengah	%	66,02	86	65,93	72,97	74,24	82,15	80,52	121,97	95,52	
		% Partisipasi Anak Perempuan dalam Dikmen	%	50,85		50,93	50,63	51,02	49,74	51,61	101,49		
		Rasio Siswa per Kelas SMA/MA	%	30		30	27,49	29,01	27,63	28,01	93,37		
		Rasio Siswa per Kelas SMK	%	32		32	31,42	32,01	34,42	31,77	99,28		
		% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah	%	50,76		45,41	29,36	45,41	45,29	49,19	96,90		
		% Tersedianya Layanan Pendidikan Menengah di Setiap Kecamatan	%	80	94,2	80	75	75	80	80	100	84,93	
5	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Nonformal	APS Penduduk Usia 16-18 Tahun	‰	439,29		439,21	446,9	523,57	574,65	637,86	145,20		
		Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun	%	99,17	95,7	98,7	98,1	98,34	98,1	98,48	99,31	102,50	
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,19	8,7	7,17	7,1	6,18	6,54	6,55	91,10	75,17	
		% Putus Sekolah Dikdasmen tertampung di PNF	%	100		100	100	98,62	98,69	100	100		
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	% Meningkatkan Jumlah Lembaga PNF	%	0,9		0,91	0,94	0,89	1	1,18	131,49		
		% TK/RA Terakreditasi A	%	5,83		5,83	5,83	6,16	6,82	8,37	143,50		
		% TK/RA Terakreditasi B	%	42,71		42,71	42,71	42,74	40,55	43,19	101,13		
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	% TK/RA Terakreditasi C	%	42,29		42,29	42,29	38,17	38,4	37,16	87,87		
		% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA	%	94,87		94,86	94,86	96,92	97,07	98,11	103,42		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,13	0,68	0,14	0,17	0,16	0,07	0,09	151,72		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,38	1,03	0,422	0,55	0,44	0,32	0,30	126,87		
		% SD/MI Terakreditasi A	%	4,67		4,33	5,04	5,22	5,72	10,40	222,67		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.	
		% SD/MI Terakreditasi B	%	61,01	78	61,01	74,43	81,04	85,44	81,80	134,08	116,87	ΣA+B
		% SD/MI Terakreditasi C	%	33,22		33,22	17,57	10,96	6,41	6,07	547,66		
		% SMP/MTs Terakreditasi A	%	31,4		29,5	38,68	39,62	38,32	46,73	148,82		
		% SMP/MTs Terakreditasi B	%	40	75	40	48,11	49,06	49,53	42,99	107,48	117,13	ΣA+B
		% SMP/MTs Terakreditasi C	%	27,62		27,62	8,49	7,55	7,48	6,54	422,19		
		Angka Lulusan SD/MI	%	99		99	99,91	100	99,97	100,00	101,01		
		Angka Lulusan SMP/MTs	%	100		99,97	100	100	99,99	100,00	100,00		
		% Siswa SD/MI memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	%	73,39		73,35	70,13	73,32	79,04	79,11	107,80		
		% Siswa SMP/MTs memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	%	21,28		21,23	36,22	24,02	22,89	23,05	108,34		
		(SPM 13) Cakupan Ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan	%	75,3	100	75,04	75,03	77,53	77,77	69,01	91,64	77,77	
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah	% SMA/MA Terakreditasi A	%	48,13		44,43	33,33	40	40,63	39,39	81,85		
		% SMA/MA Terakreditasi B	%	25,93	82,7	25,93	33,33	23,33	25	30,30	116,86	79,35	ΣA+B
		% SMA/MA Terakreditasi C	%	22,22		22,22	13,33	13,33	9,38	9,09	244,42		
		% Program Keahlian SMK Terakreditasi A	%	31,77		28,59	15,38	23,44	26,03	28,38	89,32		
		% Program Keahlian SMK Terakreditasi B	%	47,62	61,64	47,62	47,69	43,75	34,25	43,24	90,81	97,78	ΣA+B
		% Program Keahlian SMK Terakreditasi C	%	19,05		19,05	15,38	17,19	13,7	6,76	281,94		
		Angka Lulusan SMA/MA/SMK	%	100		100	99,94	99,86	99,98	100	100		
		% Siswa SMA/MA/SMK Peroleh rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7	%	58,08		57,93	73	42,77	57,46	42,69	73,50		
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	1,54		1,56	2,08	0,74	0,96	0,64	240,45		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket	
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.		
9	Meningkatnya kualitas PNF	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	92,56		92,56	82,89	92,56	92,87	92,87	100,33			
10	Terpenuhinya kebutuhan pendidik	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA		1:14		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	100,00			
		Rasio Siswa per Pendidik SD/MI		1:14		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	100,00			
		Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs		1:15		1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	100,00			
		Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA		1:11		1:11	1:10	1:11	1:11	1:11	100,00			
		Rasio Siswa per Pendidik SMK		1:13		1:15	1:15	1:15	1:17	1:17	105,48			
11	Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik	% Pendidik TK/RA memenuhi standar kualifikasi akademik	%	45,22		44,33	49,67	50,3	60,32	63,65	140,76			
		% Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik	%	71,66		71,16	82,12	84,68	87,89	87,98	122,77			
		% Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83,59		83,54	86,99	88,46	88,56	90,14	107,83			
		% Pendidik SMA/MA memenuhi standar kualifikasi akademik	%	91,75		91,7	94,25	93,01	93,28	94,40	102,89			
		% Pendidik SMK memenuhi standar kualifikasi akademik	%	90,51		90,46	94,97	93,52	96,08	96,00	106,07			
		(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	%	95	100	94,4	92,70	93,57	93,93	90,12	94,86	93,93		
		(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran	%	84,5	100	83,3	80,19	83,02	83,18	74,77	88,48	83,18		
		(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	89	100	87,5	82,96	87,48	87,52	84,92	95,42	87,52		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.	
		(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik	%	82,5	100	80,5	74,53	81,13	81,31	81,31	98,56	81,31	
		(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn	%	74,5	100	72,8	67,71	69,81	71,03	68,22	91,58	71,03	
		(SPM 10) semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	%	89	100	87,8	84,37	85,57	97,73	89,25	100,29	97,73	
		(SPM 11) semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	%	98	100	96,5	91,26	94,34	96,26	93,46	95,37	96,26	
		(SPM 12) semua pengawas Sekolah/Madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	%	100	100	95,92	97,78	97,96	100	97,96	97,96	100	
12	Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	3,73		3,63	7,19	26,64	30,88	32,49	871,03		
		% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	31,4		31,3	46,08	51,91	40,49	37,72	120,13		
		% Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat Pendidik	%	50,69		50,59	54,68	58,48	57,64	60,05	118,46		
		% Pendidik SMA/MA yg Memiliki Sertifikat Pendidik	%	45,39		45,29	38,75	41,57	47,78	46,25	101,88		
		% Pendidik SMK yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	45,39		45,29	36,29	37,95	40,76	39,20	86,36		
13	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181		181	153	206	197	181	100,00		
		Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	20		20	17	15	15	15	75,00		
		Rasio Sekolah per Pengawas	Lemb	1:17		1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	100,00		
		Besaran Pamong Belajar	Orang	6		5	2	1	1	1	16,67		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket	
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.		
14	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	88,79		88,4	87,25	87,7	86,1	89,05	100,29			
		% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	87,47		87,06	85,83	86,49	87,13	87,16	99,65			
		% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	29,22		28,19	25,25	26,61	28,27	30,74	105,20			
		% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	87,47		87,07	86,08	86,69	87,52	87,16	99,65			
		% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	87,47		87,07	85,29	86,29	86,35	87,16	99,65			
15	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar	% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik	%	93,48		91,984	87,479	89,283	85,951	87,046	93,12			
		% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik	%	93,23		92,184	89,105	90,335	88,472	88,861	95,31			
		% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	70,49		68,792	63,826	65,565	66,378	69,151	98,10			
		% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	80,94		79,952	77,358	78,302	78,505	80,374	99,30			
		(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100		
		(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	88,45	100	88,16	87,81	89,43	100	88,60	100,17	100		
		(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	81,42	100	79,536	74,528	72,642	85,047	82,24	101,01	85,05		
		(SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang guru SD/MI dan SMP/MTs	%	100	100	99,6	98,38	98,83	100	100,00	100,00	100		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional (Jika Ada)	Target Kinerja 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap		Ket
							2014	2015	2016	2017	Renstra	Standar Nas.	
16	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah	% Ruang kelas SMA/MA yang kondisinya Baik	%	100		99,71	97,33	98,35	93,91	95,14	95,14		
		% Ruang kelas SMK yang kondisinya Baik	%	99,39		99,39	97,56	98,21	93,26	94,66	95,24		
		% SMA/MA yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	96,27		91,816	76,667	83,333	85,41	84,85	88,14		
		% SMK yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	95,47		92,776	82,609	86,957	86,957	86,96	91,08		
17	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	%	82,6		80,072	72,488	74,926	77,667	80,12	96,99		
		% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	%	85,45		83,102	76,059	78,466	81,39	83,04	97,18		
18	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga	Besaran Kegiatan olahraga		85		85				208	244,71		
		Besaran prestasi olahraga		90		90				10	11,11		
		Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga		20,46		20,46				10	48,88		
		Besaran kegiatan kepemudaan		13		13				1	7,69		
		Besaran prestasi kegiatan kepemudaan		8		8				1	12,50		

Rincian capaian kinerja dan % capaian kinerja tiap sasaran strategis tahun 2017 dengan persentase capaian kinerja maksimal 100% meskipun beberapa indikator persentase capaian kinerjanya <100%, disajikan pada Tabel III.3 s/d Tabel III.20, sebagai berikut:

- Sasaran 1 :** Meningkatnya budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal dan budaya Jawa	-	32,82	61,82	86,33	86,92	100,69	100,00
2	Tersedianya buku muatan lokal	-	20,13	33,85	40,00	40,05	100,13	50,00
3	Persentase pendidik yang disiplin	99,95	99,96	99,98	99,60	99,62	100,02	99,60
4	Persentase angka kenakalan siswa	0,03	0,017	0,0277	0,00	0,022	99,98	0
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		100,00	
					Tahun 2016		99,99	
					Tahun 2015		99,99	
					Tahun 2014		99,51	

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100% meningkat dari 99,51% pada tahun 2014. Dari 4 indikator sebanyak 1 indikator tidak memenuhi target yaitu "*persentase angka kenakalan siswa*". Sasaran kinerja ini dimaksudkan untuk menghitung berapa besar pendidik yang dikenai hukuman disiplin karena melanggar peraturan kepegawaian, dan seberapa besar siswa yang dikembalikan kepada orangtua siswa karena melakukan pelanggaran berat tata tertib sekolah. Dengan dua indikator di atas diperoleh gambaran mengenai upaya pendidik/guru memberikan contoh/teladan kepada siswa. Siswa diharapkan akan mencontoh/meneladani pekerti, tata krama, tata nilai, dan keteladanan para pendidik.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka tiga indikator telah tercapai sedangkan 1 indikator lainnya akan tercapai, yaitu **“Persentase angka kenakalan siswa”**. Hal-hal yang dapat mendorong tercapainya sasaran strategis 1 diantaranya adalah adanya semangat pendidik, dan tenaga kependidikan memberikan teladan kepada peserta didik serta diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pendidikan Karakter. Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator **“Persentase angka kenakalan siswa”** yaitu siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah yang terakumulasi sehingga layak dikeluarkan, diantaranya adalah pengaruh negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat dan keluarga, dan sulitnya menyelaraskan implementasi pendidikan di satuan pendidikan dengan implementasi pendidikan di masyarakat.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Tahun)	67,13	67,66	73,49	68,63	73,85	107,61	69,13
2	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)	32,41	36,14	38,19	32,52	38,21	117,50	32,56
3	Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)	48,57	48,87	48,55	48,73	49,04	100,63	48,76
4	Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)	48,95	48,03	48,73	49,15	49,02	99,74	49,17
5	Rasio siswa per kelas TK	20,99	21,01	23,80	21,00	21,06	100,27	21
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	99,95		
					Tahun 2016	99,74		
					Tahun 2015	99,56		
					Tahun 2014	99,91		

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 99,95% meningkat dari 99,74% pada tahun 2016, lebih tinggi dari tahun 2014 yang

mencapai 99,91%. Sebanyak 4 dari 5 indikator yang telah mencapai target. Sedangkan 1 indikator yaitu **“persentase angka partisipasi anak perempuan (usia 0-6 tahun)”** tidak mencapai target. Pendidikan anak usia dini sangat penting, seperti halnya peran keluarga, masyarakat dan sekolah, untuk memastikan bahwa anak-anak prasekolah dan sekolah dasar memiliki landasan yang kokoh untuk belajar sepanjang hayat. Anak-anak yang mendapat pendidikan sejak usia dini memperlihatkan perkembangan fisik, sosio-emosional dan kognitif jauh lebih baik dari pada anak-anak yang tidak mendapatkan layanan tersebut. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, generasi penerus akan lebih berhasil di sekolah dan dapat meraih kehidupan yang lebih berkualitas.

Kelompok yang paling rentan tidak naik kelas dan putus sekolah adalah anak-anak pada tahun-tahun pertama sekolah dasar. Sejak tahun 2007 Pemerintah dan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan akses pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini, guna memperkuat kapasitas peserta didik ketika mulai sekolah. Riset menunjukkan bahwa investasi pendidikan pada usia dini menghasilkan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan investasi pada tingkat usia lainnya. Perlu kerjasama antara praktisi, penyusun kebijakan dan para ahli memperkuat agenda Pendidikan Anak Usia Dini guna meraih hasil yang lebih baik.

Berdasarkan Tabel III.4, pada tahun 2017 capaian akses (angka partisipasi kasar) pendidikan anak usia dini usia 4-6 tahun maupun usia 0-6 tahun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula partisipasi anak perempuan dalam pendidikan anak usia dini juga menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka indikator kinerja APK PAUD (usia 4-6 tahun), APK PAUD (usia 0-6 tahun), Persentase angka partisipasi anak perempuan (usia 4-6 tahun), dan Rasio siswa per kelas TK/RA/BA sudah tercapai; sedangkan indikator kinerja **“Persentase angka partisipasi perempuan usia 0-6 tahun”** sudah mencapai 99,74% sehingga Sasaran strategis 2 ini akan tercapai pada akhir tahun Renstra. Hambatan internal yang dihadapi antara lain :

- Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD pada tahun 2017.

Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD.

- Sedikitnya lembaga pendidikan anak usia dini formal (TK) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Lembaga TK negeri yang ada sebanyak 3 dari 324 lembaga (0,93%), selebihnya (99,07%) merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sebagian besar tidak memiliki sumber daya yang memadai sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat mengurangi daya tarik peserta didik. Sedangkan untuk RA/BA sebanyak 190 semuanya swasta.
- Belum adanya regulasi yang mewajibkan menempuh PAUD (formal maupun nonformal) sebelum memasuki jenjang sekolah dasar dan yang sederajat.
- Terbatasnya sarana prasarana PAUD, misalnya ruang kelas TK/RA/BA yang kondisinya baik 89,05%; yang memiliki APE dalam ruang sebesar 87,16%; dan yang memiliki APE luar ruang sebesar 87,16%.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi APK PAUD adalah :

- Banyaknya siswa SD/MI usia ≤ 6 tahun yang semestinya masih usia TK/RA/BA. Siswa SD/MI usia ≤ 6 tahun sebesar 6.913 dari 77.696 peserta didik (8,90%).
- Sedikitnya peserta didik PAUD usia ≤ 3 tahun. Peserta didik PAUD usia ≤ 3 tahun sebesar 2.251 dari 29.913 peserta didik (10,87%).
- Adanya anggapan dan pendapat sebagian masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini berbiaya mahal dan tidak penting.
- Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan APK PAUD adalah :

- Meningkatkan akses PAUD dengan cara perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD untuk menjangkau anak kurang beruntung;
- Penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 0-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak.

- Mengoptimalkan daya tampung yang tersedia di PAUD formal melalui sosialisasi informal sehingga anak usia 0-6 tahun semakin banyak tertampung.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PAUD dalam pengembangan potensi anak.
- Meningkatkan peserta didik PAUD nonformal.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase APK SD sederajat	103,80	109,43	111,06	103,67	112,13	108,16	103,70
2	Persentase APM SD sederajat	95,46	95,49	96,59	95,54	98,24	102,82	95,57
3	Persentase APK SMP sederajat	96,07	97,17	98,13	96,15	98,17	102,10	96,15
4	Persentase APM SMP sederajat	83,69	83,73	84,01	83,78	87,15	104,02	83,81
5	Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	97,02	98,00	97,37	100,00	97,49	97,49	100,00
6	Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam pendidikan dasar	48,15	48,25	48,17	48,67	48,21	99,06	48,69
7	Rasio siswa per kelas SD/MI	21,08	21,10	20,68	21,14	20,80	98,40	21,16
8	Rasio siswa per kelas SMP/MTs	31,89	31,61	30,46	31,98	30,77	96,23	32,00
9	Persentase siswa miskin penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan dasar	68,13	67,62	59,93	73,16	60,69	82,96	74,42
10	Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun	994,30	994,30	996,04	993,87	999,80	100,60	995,20
11	Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun	993,20	993,28	998,02	992,62	996,90	100,43	994,00
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		98,56	
					Tahun 2016		98,25	
					Tahun 2015		99,45	
					Tahun 2014		99,04	

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 98,56% meningkat dari 98,25% pada tahun 2016, dan juga lebih rendah dari pada tahun 2014 sebesar 99,04% maupun tahun 2015 sebesar 99,45%. Sebanyak 5 dari 11 indikator tidak mencapai target. Yaitu "*Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat, Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam pendidikan dasar, Rasio siswa per kelas SD/MI Rasio siswa per kelas SMP/MTs, dan Persentase siswa miskin penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan dasar*". Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan Tabel III.5, akses pendidikan dasar semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya APM SD/MI, meningkatnya APK SMP/MTs, meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun pada kurun waktu 4 tahun terakhir. Demikian pula angka melanjutkan ke SMP sederajat. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 6 dari 11 indikator (54,55%) sudah tercapai, sedangkan sisanya akan tercapai dengan beban yang bervariasi antara 0,94% - 17,04%.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar adalah :

- Belum optimalnya pemanfaatan ruang kelas yang ditunjukkan dengan rendahnya rasio siswa per rombongan belajar (kelas). Pada SD/MI rasio siswa per kelas 20,80; dan SMP/MTs rasio siswa per kelas 30,77. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota rasio siswa per kelas SD/MI maksimal 32, dan SMP/MTs rasio siswa per kelas SMP/MTs maksimal 36.
- Adanya siswa SD/MI yang putus sekolah sebanyak 66 dari 77.028 siswa (0,09%); dan siswa SMP/MTs yang putus sekolah sebesar 99 dari 33.054 siswa (0,30%).

- Belum terpenuhinya hak atas pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 13-15 tahun utamanya masyarakat yang berkebutuhan khusus yang dari segi jumlah relatif sedikit tetapi tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya aksesibilitas pendidikan dasar adalah :

- Pertumbuhan penduduk usia 7-12 tahun, dan penduduk usia 13-15 tahun yang relatif cukup tinggi.
- Belum optimalnya angka melanjutkan ke SMP/MTs.
- Tingginya angka kemiskinan sehingga belum semua siswa miskin mendapatkan bantuan untuk menempuh pendidikan dasar.
- Adanya lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs di luar wilayah Kabupaten Temanggung.
- Jumlah lulusan SD/MI yang menunjukkan kecenderungan meningkat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar, khususnya APK SMP/MTs adalah :

- Mengoptimalkan rasio siswa per kelas pada SMP/MTs sehingga lebih banyak menampung lulusan SD/MI.
- Mengurangi lulusan SD/MI yang melanjutkan ke luar daerah, dengan memberikan insentif bagi lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan di Kabupaten Temanggung.
- Menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS Daerah) untuk membiayai pengeluaran yang tidak dibiayai BOS Pusat.
- Menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
- Gerakan kembali ke sekolah, dan/atau gerakan kembali belajar untuk mendorong anak yang sudah terlanjur putus sekolah maupun anak yang sama sekali belum pernah sekolah agar kembali mengikuti pembelajaran baik formal maupun nonformal di satuan pendidikan terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase APK Pendidikan menengah	56,73	60,76	65,68	57,06	70,90	124,25	57,16
2	Persentase APM pendidikan menengah	40,36	51,09	53,46	40,05	58,33	145,63	40,15
3	Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah	72,97	74,24	82,15	65,93	80,52	122,14	66,02
4	Persentase partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah	50,63	51,02	49,74	50,93	51,61	101,33	50,85
5	Rasio siswa per kelas SMA/MA	1:27	1:29	27,63	30,00	28,01	93,37	1:30
6	Rasio siswa per kelas SMK	1:31	1:32	34,42	32,00	31,77	99,28	1:32
7	Persentase siswa miskin penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan menengah	29,36	45,41	45,29	45,41	49,19	108,32	50,76
8	Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00
9	Angkas partisipasi sekolah usia 16-18 tahun	446,90	523,57	574,65	439,21	637,86	145,23	442,90
10	Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun	15,29	15,37	15,88	13,57	16,38	100,00	13,57
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		99,27	
					Tahun 2016		98,96	
					Tahun 2015		99,98	
					Tahun 2014		99,56	

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 4 sebesar 99,27% meningkat dari 98,96% pada tahun 2016, namun masih lebih rendah dari tahun 2015 yaitu 99,98%, dan tahun 2014 sebesar 99,56%. Sebanyak 2 dari 10 indikator tidak mencapai target yaitu “Rasio siswa per kelas SMA/MA” dan “Rasio siswa per kelas SMK”. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah

kejuruan, dan berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Tabel III.6, akses pendidikan menengah semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya APK, meningkatnya APS penduduk usia 16-18 tahun pada kurun waktu 4 tahun terakhir. Demikian pula angka melanjutkan ke pendidikan menengah (SMA sederajat).

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 6 dari 10 indikator (60%) sudah tercapai, sedangkan sisanya akan tercapai dengan beban yang bervariasi antara 0,72% - 6,63%.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dimana target Nasional APK pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 97%, dan di setiap kecamatan tersedia minimal satu lembaga pendidikan menengah.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah adalah :

- Layanan pendidikan menengah belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan, masih terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki lembaga pendidikan menengah.
- Belum optimalnya pemanfaatan ruang kelas yang tersedia, yang ditunjukkan dengan rendahnya rasio siswa per rombongan belajar (kelas). Pada SMA/MA rasio siswa per kelas 28,01; sedangkan pada SMK rasio siswa per kelas 31,77.
- Adanya siswa SMA/MA/SMK putus sekolah sebesar 45 dari 22.640 siswa atau 0,64%.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya aksesibilitas pendidikan menengah adalah:

- Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi.
- Belum meratanya layanan pendidikan menengah. Sebanyak 4 dari 20 kecamatan belum memiliki lembaga pendidikan menengah.
- Belum optimalnya angka melanjutkan ke pendidikan menengah, sementara itu jumlah lulusan SMP/MTs cenderung meningkat.

- Adanya lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke luar wilayah Kabupaten Temanggung.
- Tingginya angka kemiskinan sehingga belum semua siswa miskin mendapatkan bantuan untuk menempuh pendidikan menengah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah, khususnya APK SMA/MA/SMK adalah:

- Berupaya menyediakan akses pendidikan menengah di seluruh kecamatan.
- Menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS), serta memberikan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah.
- Meningkatkan peran masyarakat/swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kelas (daya tampung) yang tersedia sehingga lebih banyak lulusan pendidikan dasar yang tertampung di pendidikan menengah.
- Mengurangi lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke luar daerah, dengan memberikan insentif bagi lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan di Kabupaten Temanggung.
- Membentuk gerakan kembali ke sekolah dan/atau gerakan kembali belajar.

5. Sasaran 5 : Meningkatkan aksesibilitas pendidikan nonformal

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 5 sebesar 97,78% meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 97,41% tetapi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 99,95%. Sebanyak 2 dari 4 indikator telah mencapai target, dan 2 indikator tidak mencapai target yaitu indikator "*Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun*" dan "*Rata-rata lama sekolah*". Pendidikan Orang Dewasa (POD) dikenakan pada pendidikan nonformal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun ke atas. Layanan POD terdiri atas pendidikan keaksaraan dan peningkatan budaya baca, pendidikan kursus

dan pelatihan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pencegahan perilaku destruktif.

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase angka melek huruf usia \geq 15 tahun	98,10	98,34	98,37	98,70	98,48	99,78	99,17
2	Rata-rata lama sekolah	7,10	6,18	6,55	7,17	6,55	91,35	7,19
3	Persentase layanan pendidikan kesetaraan dalam rangka menampung siswa putus sekolah pendidikan dasar dan menengah	25	98,62	98,69	100,00	100,00	100,00	100
4	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal	0,94	0,89	1,00	0,91	1,18	130,05	0,90
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	97,78		
					Tahun 2016	97,41		
					Tahun 2015	95,58		
					Tahun 2014	99,95		

Pendidikan keaksaraan merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan. Selanjutnya, mereka yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan dapat menempuh pendidikan kesetaraan. Fokus pendidikan keaksaraan adalah meningkatkan keaksaraan dan keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha bagi penduduk usia 15 tahun ke atas melalui kursus dan pelatihan kerja. Pengentasan keniraksaraan dilakukan dengan menerapkan pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan usaha mandiri yang dikombinasikan dengan pendidikan keterampilan dan peningkatan budaya baca.

Berdasarkan Tabel III.7, aksesibilitas pendidikan nonformal nampak semakin meningkat, seiring dengan semakin tingginya angka rata-rata lama sekolah sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, semakin meningkatnya siswa putus sekolah pendidikan dasar dan

menengah yang tertampung pada pendidikan kesetaraan dan semakin meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 2 dari 4 indikator (25%) sudah tercapai yaitu "*Persentase layanan pendidikan kesetaraan dalam rangka menampung siswa putus sekolah pendidikan dasar dan menengah*" dan "*Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal*", sedangkan 2 indikator lainnya akan tercapai dengan beban yang bervariasi antara 0,22% - 8,65%.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal adalah :

- Belum tersedianya standar pembiayaan pendidikan nonformal.
- Kurangnya peran pemerintah dan pemerintah daerah.
- Rendahnya mutu pendidikan nonformal.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya aksesibilitas pendidikan nonformal adalah :

- Perubahan regulasi penghitungan angka rata-rata lama sekolah, menjadi penduduk usia ≥ 25 tahun.
- Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal.
- Rendahnya minat siswa putus sekolah beralih ke pendidikan nonformal.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan nonformal, adalah :

- Penyelarasan standar kompetensi pendidikan nonformal dan calon tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Gerakan kembali ke sekolah dan/atau gerakan kembali belajar.

6. Sasaran 6 : Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 6 sebesar 95,96%, meningkat dari 95,25% pada tahun 2016, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang sudah mencapai 96,75%. Sebanyak 2 dari 3 indikator telah mencapai target sedangkan indikator "*Persentase TK/RA/BA terakreditasi C*" tidak mencapai target. Indikator ini dapat dianggap sebagai indikator negatif

karena semakin sedikitnya TK/RA/BA yang terakreditasi C berarti semakin banyak TK/RA/BA yang terakreditasi A dan B yang menunjukkan kualitas yang lebih baik. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase TK/RA/BA terakreditasi A	5,38	6,16	6,82	5,83	8,37	143,50	5,83
2	Persentase TK/RA/BA terakreditasi B	42,53	42,74	40,55	42,71	43,19	101,13	42,71
3	Persentase TK/RA/BA terakreditasi C	38,25	38,17	38,40	42,29	37,16	87,87	42,29
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	95,96		
					Tahun 2016	95,25		
					Tahun 2015	96,75		
					Tahun 2014	94,04		

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Jenjang/status akreditasi dianggap sebagai salah satu indikator penilaian kualitas pendidikan. Pemingkatan nilai akreditasi adalah sebagai berikut :

- Terakreditasi A (Sangat Baik), nilai : 86 - 100
- Terakreditasi B (Baik), nilai : 71 - 85
- Terakreditasi C (Cukup Baik), nilai : 56 - 70

Unsur yang dinilai pada pelaksanaan akreditasi TK/RA/BA, dikelompokkan menjadi 4 yang meliputi :

- Standar tingkat pencapaian perkembangan
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Standar isi, standar proses, dan standar penilaian

- Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 2 dari 3 indikator (66,67%) sudah tercapai yaitu “%TK/RA/BA terakreditasi A” dan “%TK/RA/BA terakreditasi B”, sedangkan 1 indikator lainnya perlu upaya keras untuk mencapai target akhir Renstra dengan beban sebesar 12,13%.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini adalah :

- Sedikitnya jumlah TK/RA/BA yang dapat memenuhi kriteria penilaian akreditasi yang mencakup standar tingkat pencapaian perkembangan peserta didik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- Terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah TK/RA/BA yang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini adalah:

- Perubahan kebijakan terkait dengan institusi yang berwenang melakukan akreditasi dan jenjang akreditasi TK/RA/BA.
- Tingginya partisipasi masyarakat belum diimbangi dengan kemampuan finansial dan manajerial pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Upaya yang dapat dilakukan mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini antara lain, adalah :

- Meningkatkan kemampuan finansial dan manajerial pengelolaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Meningkatkan pemenuhan standar pendidikan anak usia dini secara bertahap.

7. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pendidikan dasar

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 7 sebesar 99,46% lebih tinggi daripada tahun 2016 sebesar 89,76%. Capaian kinerja tahun 2017 merupakan capaian kinerja tertinggi sejak tahun 2014. Sejumlah 14 dari 15

indikator telah mencapai target. Indikator kinerja yang tidak mencapai target adalah “Cakupan kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan”.

Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pendidikan dasar								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	% siswa baru SD/MI yg berasal dari TK/RA/BA	94,86	96,92	97,07	94,86	98,11	103,43	94,87
2	Angka putus sekolah SD/MI	0,17	0,16	0,07	0,14	0,09	163,39	0,13
3	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,55	0,44	0,325	0,422	0,30	140,90	0,34
4	Persentase SD/MI terakreditasi A	5,04	5,22	5,72	4,33	10,40	240,15	4,67
5	Persentase SD/MI terakreditasi B	74,43	81,04	85,44	61,01	81,80	134,08	61,01
6	Persentase SD/MI terakreditasi C	17,57	10,96	6,41	33,22	6,07	547,66	33,22
7	Persentase SMP/MTs terakreditasi A	38,68	39,62	38,32	29,50	46,73	158,40	31,40
8	Persentase SMP/MTs terakreditasi B	48,11	49,06	49,53	40,00	42,99	107,48	40,00
9	Persentase SMP/MTs terakreditasi C	8,49	7,55	7,48	27,62	6,54	422,19	27,62
10	Persentase angka lulusan SD/MI	99,91	100,00	99,97	99,00	100,00	101,01	100,00
11	Persentase angka lulusan SMP/MTs	100,00	100,00	99,99	99,97	100,00	100,03	100,00
12	Persentase siswa SD/MI yg memperoleh rerata nilai ujian nasional murni $\geq 7,00$	70,13	73,32	79,04	73,35	79,11	107,85	73,39
13	Persentase siswa SMP/MTs yang memperoleh rerata nilai ujian nasional murni $\geq 7,00$	36,22	24,02	22,89	21,23	23,05	108,59	21,28
14	Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Cakupan kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan (%)	75,03	77,53	77,77	75,04	69,01	91,96	75,30
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		99,46	
					Tahun 2016		89,76	
					Tahun 2015		90,69	
					Tahun 2014		90,99	

Berbeda dengan TK/RA/BA, unsur yang dinilai pada pelaksanaan akreditasi jenjang pendidikan dasar, dikelompokkan menjadi 8, sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 14 dari 15 indikator (93,33%) sudah tercapai, 1 indikator akan tercapai yaitu "*Cakupan kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan*". Diperlukan peningkatan sebesar 8,04% untuk mencapai target akhir Renstra.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan dasar adalah :

- Menurunnya jumlah satuan pendidikan dasar yang dapat memenuhi kriteria terakreditasi A, dan B. Masa berlaku hasil akreditasi selama 5 tahun. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dasar secara perlahan bergeser dengan meningkatnya peran masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan dasar khususnya SD.
- Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah satuan pendidikan dasar yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas.
- Sebagian besar SD negeri status tanahnya belum bersertifikat atas nama satuan pendidikan, menghambat satuan pendidikan mencapai status terakreditasi A.
- Perubahan kebijakan terkait dengan jumlah siswa per kelas yang dikaitkan dengan pemberian tunjangan profesi pendidik. Hal ini akan mendorong terjadinya pengurangan jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu akibat penggabungan sekolah.

Hambatan eksternal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan dasar adalah:

- Terbatasnya alokasi anggaran akreditasi. Anggaran yang tersedia hanya mampu membiayai unit pelaksana akreditasi.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat belum diimbangi dengan kemampuan finansial dan manajerial pengelolaan pendidikan dasar.
- Adanya kesan bahwa munculnya beberapa satuan pendidikan yang dikelola masyarakat kemandiriannya rendah, dan seolah-olah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, adalah :

- Mendorong terbentuknya Tim Koordinasi peningkatan kualitas pendidikan dasar.
- Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan
- Meningkatkan kemampuan finansial dan manajerial pengelolaan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

8. Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas pendidikan menengah

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 8 sebesar 94,71% meningkat dari 86,85% pada tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2017 merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2014. Sejumlah 5 dari 9 indikator (55,56%) telah mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target adalah "*Persentase program SMA/MA terakreditasi A*", "*Persentase program keahlian SMK terakreditasi A*", "*Persentase program keahlian SMK terakreditasi B*" dan "*Persentase siswa SMA/ MA/SMK yang memperoleh nilai rerata ujian nasional murni $\geq 7,00$* ". Unsur yang dinilai pada pelaksanaan akreditasi jenjang pendidikan menengah sama dengan jenjang pendidikan dasar.

Berdasarkan Tabel III.10; capaian indikator sasaran strategis 8 menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan menengah semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 5 dari 9 indikator (55,56%) sudah tercapai, 3 indikator akan tercapai dengan beban setiap indikator

bervariasi antara 0,73% - 11,33%, sedangkan 1 indikator yaitu “*Persentase siswa SMA/ MA/SMK yang memperoleh nilai rerata ujian nasional murni $\geq 7,00$* ” perlu upaya keras dengan capaian sebesar 73,69% dari target akhir Renstra.

Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pendidikan menengah								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase SMA/MA terakreditasi A	33,33	40,00	40,63	44,43	39,39	88,67	48,13
2	Persentase SMA/MA terakreditasi B	33,33	23,33	25,00	25,93	30,30	116,86	25,93
3	Persentase SMA/MA terakreditasi C	13,33	13,33	9,38	22,22	9,09	244,42	22,22
4	Persentase program keahlian SMK terakreditasi A	15,38	23,44	26,03	28,59	28,38	99,26	31,77
5	Persentase program keahlian SMK terakreditasi B	47,69	43,75	34,25	47,62	43,24	90,81	47,62
6	Persentase program keahlian SMK terakreditasi C	15,38	17,19	13,70	19,05	6,76	281,94	19,05
7	Persentase angka lulusan SMA/MA/SMK	99,94	99,86	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase siswa SMA/MA/SMK yang memperoleh nilai rerata ujian nasional murni $\geq 7,00$	73,00	42,77	57,46	57,93	42,69	73,69	58,08
9	Angka putus sekolah SMA/MA/SMK	2,08	0,74	0,96	1,56	0,64	243,58	1,54
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		94,71	
					Tahun 2016		86,85	
					Tahun 2015		89,57	
					Tahun 2014		89,42	

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan menengah adalah :

- Menurunnya jumlah satuan pendidikan menengah yang dapat memenuhi kriteria terakreditasi A, dan B. Masa berlaku hasil akreditasi selama 5 tahun.
- Peran masyarakat semakin dominan dari pada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah sekolah yang diselenggarakan

oleh masyarakat (swasta) baik pada SMA/MA, maupun SMK. Pada tahun 2017 SMA/MA/SMK berjumlah 56 sebanyak 43 (76,79%) diantaranya dikelola oleh masyarakat.

- Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah satuan pendidikan menengah yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan menengah adalah :

- Meningkatnya partisipasi masyarakat belum diimbangi dengan kemampuan finansial dan manajerial pengelolaan pendidikan menengah.
- Adanya kesan bahwa munculnya beberapa satuan pendidikan yang dikelola masyarakat kemandiriannya rendah, dan seolah-olah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah, adalah :

- Pemenuhan standar nasional pendidikan menengah.
- Mendorong terbentuknya Tim Koordinasi peningkatan kualitas pendidikan menengah.
- Meningkatkan kemampuan finansial dan manajerial pengelolaan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

9. Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal

Tabel III.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan	82,89	92,56	92,87	92,56	92,87	100,33	92,56
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		100,00	
					Tahun 2016		100,00	
					Tahun 2015		100,00	
					Tahun 2014		95,21	

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 9 sebesar 100,00% sama dengan tahun 2016, tahun 2015, dan meningkat dari 95,21% pada tahun 2014. Sasaran strategis 9 terdiri dari satu indikator, oleh karena itu belum dapat menggambarkan secara utuh peningkatan kualitas pendidikan nonformal. Berdasarkan Tabel III.11; persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka indikator sasaran strategis Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan sudah tercapai.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan nonformal adalah :

- Peran masyarakat sangat dominan dalam pengelolaan pendidikan nonformal.
- Sedikitnya jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi.
- Rendahnya kemampuan lembaga pendidikan nonformal dalam memenuhi standar pengelolaan dan manajemen pendidikan nonformal.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan nonformal adalah :

- Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal.
- Kurangnya informasi dan publikasi pendidikan nonformal.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, adalah :

- Pemenuhan standar nasional pendidikan nonformal secara bertahap.
- Mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal.
- Meningkatkan kemampuan finansial dan manajerial pengelola pendidikan nonformal.

10. Sasaran 10 : Terpenuhinya kebutuhan pendidik

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 10 sebesar 100%, meningkat dari 96,47% pada tahun 2016. Sebanyak 5 dari 5 indikator (100%) berhasil mencapai target. Rasio siswa per pendidik digunakan untuk mengetahui rata-rata pendidik melayani siswa di suatu sekolah atau daerah

sehingga dapat diketahui sekolah atau daerah mana yang memerlukan tambahan pendidik secara makro. Makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh satu orang pendidik, atau makin kurang jumlah pendidik di suatu sekolah atau daerah. Rasio siswa per pendidik 1:14 berarti 1 orang pendidik melayani 14 orang siswa. Norma nasional rasio siswa per pendidik adalah 1:18 untuk SD/MI, 1:12 untuk SMP/MTs, dan 1:11 untuk SMA/MA/SMK.

Tabel III.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya kebutuhan pendidik								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Rasio siswa per pendidik TK/RA/BA	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	100,00	1:14
2	Rasio siswa per pendidik SD/MI	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	100,00	1:14
3	Rasio siswa per pendidik SMP/MTs	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	100,00	1:15
4	Rasio siswa per pendidik SMA/MA	1:10	1:11	1:11	1:11	1:11	100,00	1:11
5	Rasio siswa per pendidik SMK	1:15	1:15	1:17	1:15	1:17	102,67	1:11
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		100,00	
					Tahun 2016		96,47	
					Tahun 2015		100,00	
					Tahun 2014		99,46	

Berdasarkan Tabel III.12, rasio siswa per pendidik TK/RA/BA, dan SD/MI berada di bawah norma nasional, sedangkan untuk SMP/MTs, dan SMK di atas norma nasional, sedangkan rasio siswa per pendidik SMA/MA sama dengan norma nasional. Rasio siswa per pendidik belum dapat menggambarkan secara konkrit berapa jumlah pendidik yang dibutuhkan atau berapa tambahan pendidik yang diperlukan maupun berapa jumlah kelebihan pendidik. Perhitungan kebutuhan pendidik secara mikro harus mempertimbangkan jumlah rombongan belajar, jam pelajaran per minggu, dan beban mengajar minimal setiap pendidik setiap minggu.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka 5 dari 5 indikator (100%) sasaran strategis 10 (Terpenuhinya kebutuhan pendidik) sudah tercapai.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan pendidik adalah :

- Rendahnya prosentase pendidik PNS pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- Sedikitnya jumlah pegawai administrasi sekolah.
- Banyaknya tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi pendidik.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan pendidik adalah :

- Moratorium pengangkatan CPNS termasuk pendidik dan tenaga kependidikan.
- Adanya kecenderungan pendidik yang enggan bertugas di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan pendidik adalah :

- Pengangkatan CPNS pendidik.
- Distribusi pendidik sesuai dengan kebutuhan.
- Memaksimalkan beban mengajar pendidik.

11. Sasaran 11 : Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 11 sebesar 98,51%, capaian kinerja paling rendah sejak tahun 2014. Sebanyak 6 dari 13 indikator (46,15%) berhasil mencapai target. Indikator-indikator yang tidak mencapai target yaitu:

- a. Cakupan ketersediaan guru SD/MI (%);
- b. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per satuan pelajaran (%);
- c. Cakupan ketersediaan guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 yang telah memiliki sertifikat pendidik (%);
- d. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn (%); dan
- e. Cakupan kualifikasi akademik kepala SMP/MTs (%).

Tabel III.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	% pendidik TK/ RA/BA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	49,67	50,30	60,32	44,33	63,65	143,59	45,20
2	% pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik	82,12	84,68	87,89	71,16	87,98	123,63	71,66
3	% pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik	86,99	88,46	88,56	83,54	90,14	107,90	83,59
4	% pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik	94,25	93,01	93,28	91,70	94,40	102,94	91,75
5	% pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik	94,97	93,52	96,08	90,46	96,00	106,13	90,51
6	Cakupan ketersediaan guru SD/MI (%)	92,70	93,57	93,93	94,40	90,12	95,47	95,00
7	Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs per satuan pelajaran (%)	80,19	83,02	83,18	83,30	74,77	89,76	84,50
8	Cakupan ketersediaan guru SD/MI yg memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	82,96	87,48	87,52	87,50	84,92	97,05	89,00
9	Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs (%)	74,53	81,13	81,31	80,50	81,31	101,00	82,50
10	Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn (%)	67,71	69,81	71,03	72,80	68,22	93,71	74,50
11	Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI (%)	84,37	85,57	97,73	87,80	89,25	101,66	89,00
12	Cakupan kualifikasi akademik kepala SMP/MTs (%)	91,26	94,34	96,26	96,50	93,46	96,85	98,00
13	Cakupan kualifikasi akademik pengawas sekolah/ madrasah (%)	97,78	97,96	100,00	95,92	97,96	102,13	95,92
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		98,51	
					Tahun 2016		99,99	
					Tahun 2015		100,00	
					Tahun 2014		99,94	

Standar kualifikasi akademik pendidik (guru) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Secara makro standar kualifikasi akademik pendidik semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai pendidikan menengah adalah S1 atau D4.

Berdasarkan Tabel III.13, Persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik semakin meningkat sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 persentase pendidik TK/RA/BA yang memenuhi standar kualifikasi akademik sebesar 49,67% meningkat menjadi 63,65% pada tahun 2017; demikian pula persentase pendidik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik meningkat secara variatif. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka target sebanyak 7 dari 13 indikator (53,85%) telah tercapai, sedangkan 6 indikator lainnya akan tercapai dengan beban masing-masing indikator bervariasi antara 4,08% - 9,73%.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualifikasi akademik pendidik adalah:

- Rendahnya minat pendidik dengan kualifikasi akademik kurang dari S1/D4 untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4, terutama bagi pendidik yang usianya menjelang batas pensiun.
- Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 tersebar jauh dari lokasi pembelajaran LPTK yang kompeten.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualifikasi akademik pendidik adalah :

- Lokasi pembelajaran LPTK yang kompeten jauh dari tempat tinggal/tempat tugas pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1/D4.
- Rekrutmen pendidik belum memperhatikan sepenuhnya standar kualifikasi akademik pendidik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualifikasi akademik pendidik adalah:

- Meningkatkan motivasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya hingga mencapai S1/D4, termasuk pada satuan pendidikan swasta.

- Menyediakan bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4.
- Memberlakukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan konsisten dan bijaksana.

12. Sasaran 12 : Meningkatnya profesionalisme pendidik

Tabel III.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya profesionalisme pendidik								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Pendidik TK/RA/BA yang memiliki sertifikat pendidik	7,19	26,64	30,88	3,63	32,49	895,03	3,73
2	Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik	46,08	51,91	40,49	31,30	37,72	120,51	31,40
3	Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik	54,68	58,48	57,64	50,59	60,05	118,69	50,69
4	Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik	38,75	41,57	47,78	45,29	46,25	102,11	45,39
5	Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	36,29	37,95	40,76	45,29	41,82	92,34	45,39
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		98,47	
					Tahun 2016		98,04	
					Tahun 2015		95,27	
					Tahun 2014		93,38	

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 12 sebesar 98,47% meningkat dari 98,04% pada tahun 2016, merupakan capaian kinerja paling tinggi sejak tahun 2014. Sebanyak 4 dari 5 indikator (80%) telah mencapai target, sedangkan 1 indikator yaitu "*Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik*" tidak dapat memenuhi target. Regulasi yang mengatur tentang sertifikasi pendidik/guru diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas,

guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, atau pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Berdasarkan Tabel III.14, Persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik semakin meningkat sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 persentase pendidik TK/RA/BA yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 7,19% meningkat menjadi 32,49% pada tahun 2017; demikian pula persentase pendidik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang memiliki sertifikat pendidik meningkat secara variatif.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka indikator sebanyak 4 dari 5 indikator (80%) telah tercapai, sedangkan 1 indikator yaitu "*Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik*" dengan angka realisasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 41,82% sedangkan target akhir Renstra sebesar 45,39%.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya profesionalisme pendidik yang diukur dengan persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik adalah:

- Pendidik yang masuk nominasi mengikuti diklat, kompetensinya kurang sehingga tidak lulus PLPG.
- Sebagian kuota ditetapkan berdasarkan usia, sehingga kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya profesionalisme pendidik yang diukur dengan persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik adalah:

- Kuota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Adanya asumsi bahwa tidak ada hubungan yang linier antara pendidik yang memiliki sertifikat pendidik terhadap hasil belajar siswa, sedangkan ekspektasi masyarakat sangat tinggi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya profesionalisme pendidik yang diukur dengan persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik adalah:

- Mengusulkan tambahan kuota, yang disesuaikan dengan kondisi daerah, dan pendidik yang siap mengikuti PLPG sehingga kuota yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal.
- Menerapkan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa.
- Melaksanakan penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan.
- Perbaiki desain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru
- Melaksanakan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru.

13. Sasaran 13 : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan

Tabel III.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

SASARAN STRATEGIS : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Besaran pegawai administrasi sekolah	153	206	197	181	181	100,00	181
2	Besaran penilik pendidikan nonformal	17	15	15	20	15	75,00	20
3	Rasio pengawas sekolah	1:17	1:17	1:17	17	16	93,89	1:17
4	Besaran pamong belajar	2	1	1	5	1	20,00	6
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	72,22		
					Tahun 2016	73,75		
					Tahun 2015	75,00		
					Tahun 2014	86,41		

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 13 sebesar 72,22% lebih rendah dari tahun 2016 yang sebesar 73,75%. Capaian kinerja tahun 2017 merupakan capaian kinerja paling rendah sejak tahun 2014.

Sebanyak 1 dari 4 indikator (25%) telah mencapai target tahunan. sedangkan 3 indikator lainnya yaitu “*Besaran penilik pendidikan nonformal*”, “*Rasio pengawas sekolah*” dan “*Besaran pamong belajar*” tidak mencapai target. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Berdasarkan Tabel III.15, maka sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan menunjukkan penurunan pada indikator besaran penilik pendidikan nonformal, rasio pengawas sekolah, dan besaran pamong belajar, yang disebabkan karena tidak adanya rekrutmen penilik pendidikan nonformal, bertambahnya jumlah pengawas sekolah, dan pamong belajar beberapa tahun terakhir. Disamping itu juga disebabkan adanya penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar yang mutasi, promosi, dan pensiun. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh indikator besaran pegawai administrasi sekolah yang menunjukkan peningkatan. Dengan makin banyaknya ASN yang pensiun akan mempengaruhi kinerja indikator “besaran pegawai administrasi sekolah” karena adanya beberapa pegawai administrasi sekolah yang dimutasi dipindahtugaskan ke perangkat daerah. Besaran pegawai administrasi sekolah adalah pegawai administrasi sekolah yang berstatus PNS.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sebanyak 1 dari 4 indikator (25%) sudah tercapai, 2 indikator yaitu “*Besaran penilik pendidikan nonformal*” dan “*Besaran pamong belajar*” statusnya perlu upaya keras. Indikator besaran penilik pendidikan nonformal dan besaran pamong belajar diperkirakan bisa dicapai melalui rekrutmen yang dilakukan dengan sistem promosi dan/atau alih fungsi pegawai yang memiliki minat, serta memenuhi syarat, dan kompetensi tertentu. Sedangkan rasio pengawas sekolah statusnya akan tercapai. Kebijakan yang diterapkan terkait pengawas sekolah mengarah kepada pengawas mata pelajaran, bukan pengawas jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan jumlah pengawas sekolah yang semakin bertambah.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan adalah:

- Rendahnya minat menjadi penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar.

- Rendahnya jumlah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan adalah:

- Kurangnya pemahaman tentang proses dan prosedur pengangkatan dalam jabatan fungsional penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar.
- Kurangnya pemahaman tentang proses dan prosedur penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar menyebabkan kedua jabatan fungsional tersebut kurang diminati.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan adalah:

- Meningkatkan pemahaman tentang proses dan prosedur pengangkatan dalam jabatan fungsional penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar.
- Meningkatkan pemahaman tentang proses dan prosedur penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar.
- Mengusulkan pengangkatan dalam jabatan fungsional penilik pendidikan nonformal, dan pamong belajar.

14. Sasaran 14 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 14 sebesar 100,00% menurun dari 99,50% pada tahun 2016. Sebanyak 5 dari 5 indikator (100%) telah mencapai target. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sarana prasarana yang dimiliki TK/RA/BA antara lain : luas lahan minimal 300 m², memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 m² per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik, memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.

Dari sarana prasarana seperti tersebut di atas kami memilih 5 yang dapat menggambarkan ketercukupannya. Berdasarkan Tabel III.16, maka sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sebanyak 2 dari 5 indikator (40%) yaitu “*Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik*” dan “*Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya*” telah tercapai, sedangkan 3 indikator lainnya akan tercapai dengan beban setiap indikator masing-masing 0,31%.

Tabel III.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	87,25	87,70	86,10	88,40	89,05	100,73	88,79
2	Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	85,83	86,49	87,13	87,06	87,16	100,11	87,47
3	Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	25,25	26,61	28,27	28,19	30,74	109,04	29,22
4	Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	86,08	86,69	87,52	87,07	87,16	100,10	87,47
5	Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	85,29	86,29	86,35	87,07	87,16	100,10	87,47
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	100,00		
					Tahun 2016	99,50		
					Tahun 2015	100,00		
					Tahun 2014	99,88		

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah :

- Banyaknya item dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu.
- Sedikitnya jumlah satuan TK/RA yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah:

- Kurangnya pemahaman peran pendidikan anak usia dini bagi pengembangan potensi anak.
- Retorika terkait urgensi pendidikan anak usia dini kadang hanya digunakan untuk kepentingan sesaat oleh pihak-pihak tertentu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah:

- Meningkatkan komitmen pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.
- Menambah jumlah satuan pendidikan TK yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- Meningkatkan pemahaman urgensi pendidikan anak usia dini bagi pengembangan potensi anak.

15. Sasaran 15 : Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 15 sebesar 99,55% meningkat dari 98,80% pada tahun 2016. Sebanyak 6 dari 8 indikator (60%) telah mencapai target. Sedangkan 2 indikator lainnya belum memenuhi target, yaitu "*% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik*" dan "*% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik*".

Sarana dan prasarana pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Berdasarkan Tabel III.17, maka sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sebanyak 4 dari 8 indikator (50%) telah tercapai, sedangkan 4 indikator lainnya

berstatus akan tercapai dengan beban masing-masing indikator yang bervariasi antara 0,57% - 6,43%.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah:

- Banyaknya item dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu.
- Berkurangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar akibat pemahaman pihak terkait yang kurang tepat.

Tabel III.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik	87,48	89,28	85,951	91,984	87,05	94,63	93,48
2	% Ruang Kelas SMP/MTs yg Kondisinya Baik	89,11	90,33	88,472	92,184	88,86	96,39	93,23
3	% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	63,83	65,565	66,378	68,792	69,15	100,52	70,49
4	Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarpras sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	77,36	78,302	78,505	79,952	80,37	100,53	80,94
5	Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil (%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
6	Cakupan ketersediaan Sarpras kelas (SD/MI dan SMP/MTs) (%)	87,81	89,43	100,00	88,16	88,60	100,50	88,45
7	Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs (%)	74,53	72,642	85,05	79,54	82,24	103,40	81,42
8	Cakupan Ketersediaan Ruang Guru (%)	98,38	98,83	100,00	99,60	100,00	100,40	100,00
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		99,55	
					Tahun 2016		98,80	
					Tahun 2015		99,48	
					Tahun 2014		99,85	

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah:

- Berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan dasar sebagai akibat dari informasi yang tidak tepat.
- Retorika terkait pendidikan gratis yang digunakan untuk kepentingan sesaat oleh pihak-pihak tertentu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah :

- Meningkatkan komitmen pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
- Mengurangi pengaruh retorika terkait pendidikan gratis yang digunakan untuk kepentingan sesaat oleh pihak-pihak tertentu.

16. Sasaran 16 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah

Tabel III.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik	97,33	98,35	93,91	99,71	95,14	95,41	100,00
2	Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik	97,56	98,21	93,26	99,39	94,66	95,24	99,39
3	Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	76,67	83,333	85,410	91,816	84,848	92,41	96,27
4	Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sar prasarana	82,61	86,957	86,957	92,776	86,957	93,73	95,47
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017		94,20	
					Tahun 2016		95,76	
					Tahun 2015		99,43	
					Tahun 2014		96,97	

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 16 sebesar 94,20% menurun dari 95,76% pada tahun 2016, merupakan capaian kinerja paling rendah sejak tahun 2014. Sebanyak 4 dari 4 indikator (100%) tidak dapat mencapai target tahunan. Sarana dan prasarana pendidikan menengah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Berdasarkan Tabel III.18, maka sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah menunjukkan penurunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sebanyak 4 dari 4 indikator (100%) akan tercapai dengan beban masing-masing indikator bervariasi antara 8,52% - 11,43%.

Hambatan internal yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah:

- Banyaknya item dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu.
- Berkurangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah akibat pemahaman pihak terkait yang kurang tepat .

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah :

- Berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan menengah akibat informasi yang tidak tepat.
- Retorika terkait pendidikan gratis yang digunakan untuk kepentingan sesaat oleh pihak-pihak tertentu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar adalah:

- Meningkatkan komitmen pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menengah.

- Mengurangi pengaruh retorika terkait pendidikan gratis yang digunakan untuk kepentingan sesaat oleh pihak-pihak tertentu.
- Meningkatkan peran serta dunia usaha dan dunia industri.

17. Sasaran 17 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 17 sebesar 99,99% menurun sedikit dari 100% pada tahun 2016. Sebanyak 1 dari 2 indikator (50%) telah mencapai target. Satu indikator yaitu “*Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar*” tidak mencapai target renja. Berdasarkan Tabel III.19, maka sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 3 tahun sampai dengan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 menurun 0,01% dari tahun 2016.

Tabel III.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	72,49	74,926	77,667	80,072	80,117	100,06	82,60
2	Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	76,05	78,466	81,390	83,102	83,041	99,93	85,45
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	99,99		
					Tahun 2016	100,00		
					Tahun 2015	99,94		
					Tahun 2014	99,81		

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sebanyak 2 dari 2 indikator (100%) akan tercapai dengan beban masing-masing indikator 2,48% dan 2,41%.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal adalah:

- Belum tersedianya standar pembiayaan pendidikan nonformal, dan kurangnya peran pemerintah dan pemerintah daerah.
- Berkurangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akibat pemahaman pihak terkait yang kurang tepat.

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal adalah:

- Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal.
- Sedikitnya jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal adalah:

- Meningkatkan komitmen pihak terkait untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan nonformal.
- Akreditasi lembaga pendidikan nonformal.
- Penyelarasan standar kompetensi pendidikan nonformal dan calon tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan nonformal.

18. Sasaran 18 : Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga

Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 18 sebesar 67,63%. Sasaran strategis 18 merupakan penggabungan dari urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai konsekwensi dari pembentukan OPD baru pada tahun 2017. Urusan ini sebelumnya dilaksanakan oleh OPD lain. Sebanyak 2 dari 5 indikator (40%) telah mencapai target. Tiga indikator yaitu "*Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga*", "*Besaran kegiatan kepemudaan*", dan "*Besaran prestasi kegiatan kepemudaan*" tidak mencapai target renja. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka sebanyak 2 dari 5 indikator (40%) sudah tercapai, sedangkan tiga indikator lainnya perlu upaya keras.

Hambatan internal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga adalah:

- Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.
- Kompleksitas permasalahan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.
- Keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten untuk pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga								
INDIKATOR KINERJA		Realisasi Kinerja			Tahun 2017			Target Akhir Renstra
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	
1	Besaran kegiatan olahraga				85	157	184,71	85
2	Besaran prestasi olahraga				90	157	174,44	90
3	Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga				20,46	9,97	48,73	20,46
4	Besaran kegiatan kepemudaan				13	10	76,92	13
5	Besaran prestasi kegiatan kepemudaan				8	1	12,50	8
Rata-rata capaian sasaran					Tahun 2017	67,63		
					Tahun 2016			
					Tahun 2015			
					Tahun 2014			

Hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga adalah:

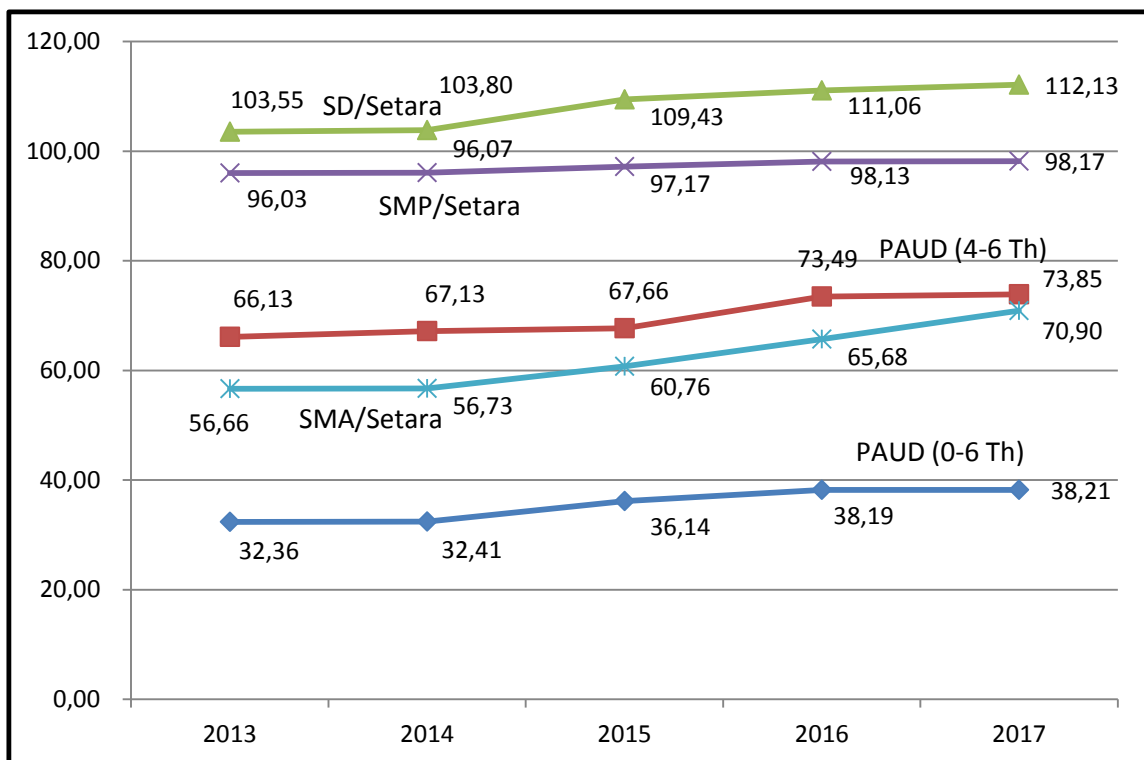
- Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme.
- Meningkatnya penyalahgunaan narkoba, zat adiktif lainnya, dan teknologi informasi komunikasi.
- Sedikitnya even pembinaan olahraga.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga adalah:

- Peningkatan anggaran untuk pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.
- Peningkatan pendidikan karakter.
- Peningkatan peran serta swasta khususnya dunia usaha dan dunia industri.
- Peningkatan jumlah even olahraga yang kompetitif.

Untuk menggambarkan perkembangan capaian kinerja beberapa indikator sasaran strategis selama beberapa tahun terakhir disajikan grafik beberapa indikator kinerja sasaran yang dianggap dapat mewakili sasaran strategis terkait dengan aksesibilitas, mutu, dan sarana prasarana pendidikan sebagai berikut:

1. Angka partisipasi kasar;
2. Angka partisipasi murni;
3. Angka melanjutkan;
4. Angka putus sekolah;
5. Jenjang akreditasi;
6. Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik; dan
7. Ruang kelas yang kondisinya baik.



Grafik III.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) %

Grafik III.1 memperlihatkan perkembangan angka partisipasi kasar PAUD (Usia 4-6 Tahun), PAUD (Usia 0-6 Tahun), SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok penduduk usia tertentu yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi jenjang sekolah.

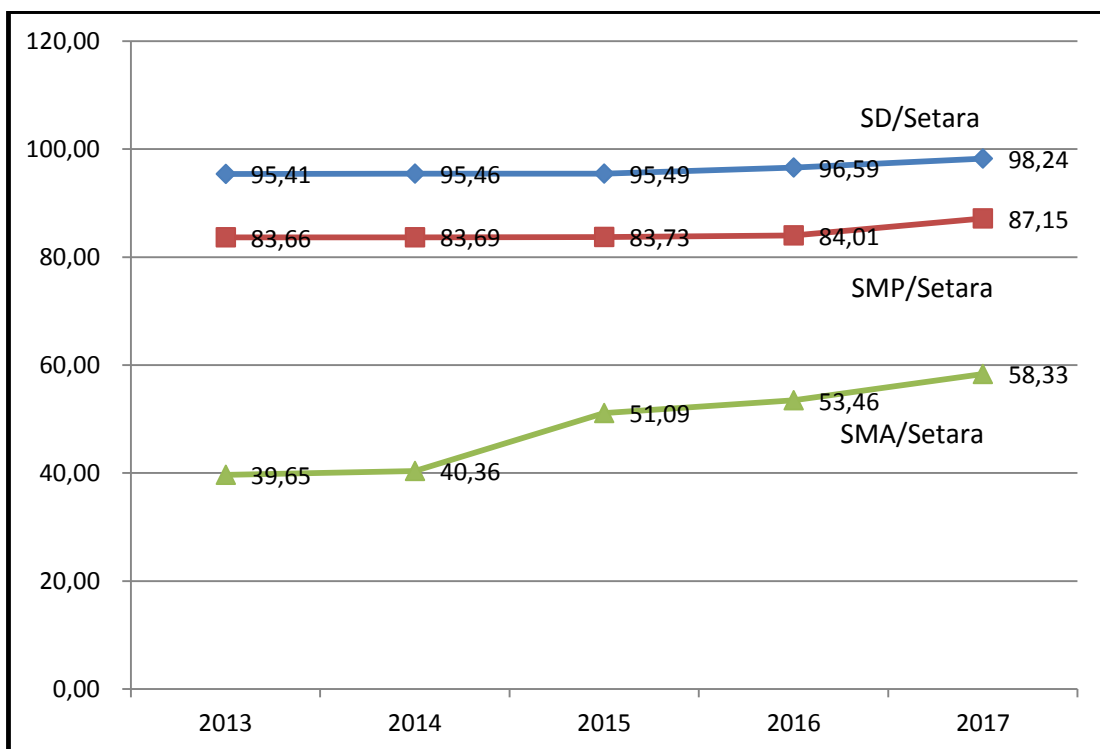
APK rata-rata semua jenjang meningkat dari 75,95% pada tahun 2013 menjadi 78,65% pada tahun 2017. Dari keempat jenjang pendidikan, APK yang paling tinggi adalah SD/MI, kemudian SMP/MTs, dan yang paling rendah PAUD (Usia 0-6 Tahun). Hal ini menunjukkan bahwa jenjang SD/MI memiliki tingkat pemerataan pendidikan yang paling baik dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs, SMA/MA/SMK, maupun PAUD.

Melihat APK SMA/MA/SMK yaitu 70,90% pada tahun 2017 relatif masih rendah dibandingkan dengan jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun PAUD (4-6 tahun), serta melihat juga target nasional pada tahun 2020 APK Pendidikan Menengah sebesar 97%, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, nampaknya cukup sulit untuk bisa mencapai target tersebut tanpa adanya upaya-upaya yang tepat, dan sungguh-sungguh guna mendorong tercapainya target tersebut.

Kesenjangan antara kondisi eksisting dengan target tahun 2020 sebesar 26,1%, sehingga masih diperlukan kenaikan rata-rata setiap tahun sebesar 8,7%. Oleh karenanya diperlukan kebijakan daerah yang tepat, dan berdampak pada percepatan peningkatan APK Pendidikan Menengah. Diantara langkah yang perlu dipertimbangkan untuk ditempuh adalah membentuk Tim Koordinasi antar OPD untuk mensinergikan seluruh potensi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat guna percepatan

peningkatan APK Pendidikan Menengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendidikan Menengah merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan APK Pendidikan Menengah diantaranya melalui:

- Penyediaan layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan, sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan layanan pendidikan menengah.
- Peningkatan daya tampung pendidikan menengah dengan pembangunan ruang kelas baru secara selektif.
- Peningkatan motivasi belajar merupakan kebutuhan sekaligus hak, dan kewajiban individu, melalui pendekatan sosial, budaya, dan agama.

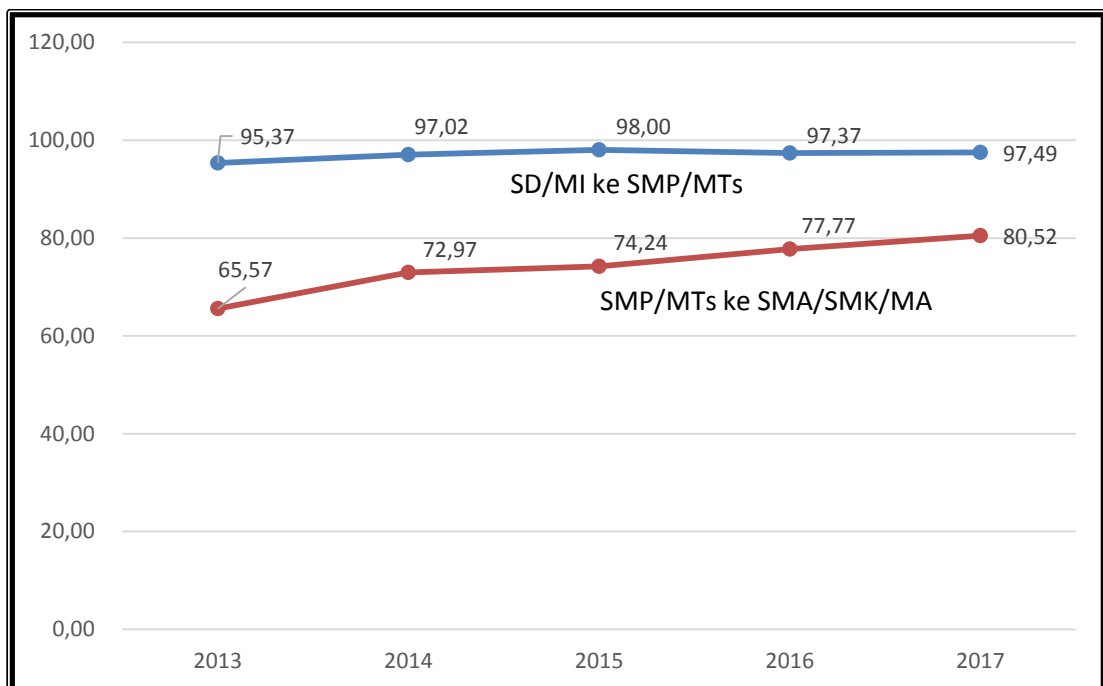


Grafik III.2
Angka Partisipasi Murni (APM) %

Grafik III.2 memperlihatkan perkembangan angka partisipasi murni selama 5 tahun terakhir. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya

serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal APM =100%, bila lebih besar dari 100% disebabkan karena adanya siswa yang berasal dari luar daerah, adanya siswa mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Sebagaimana APK, APM juga mengalami fluktuasi. Dari ketiga jenjang pendidikan, APM yang paling tinggi adalah SD/MI, kemudian SMP/MTs, dan yang paling rendah SMA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang SD/MI memiliki tingkat pemerataan pendidikan yang paling baik dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Diperlukan upaya keras, sungguh-sungguh, dan sinergitas semua potensi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan hampir sama atau sama dengan yang dilakukan untuk meningkatkan APK Pendidikan Menengah.



Grafik III.3
Angka Transisi/Angka Melanjutkan (%)

Perlu disampaikan bahwa untuk PAUD tidak ada pengukuran APM karena indikator APK PAUD baik usia 0-6 tahun maupun usia 4-6 tahun

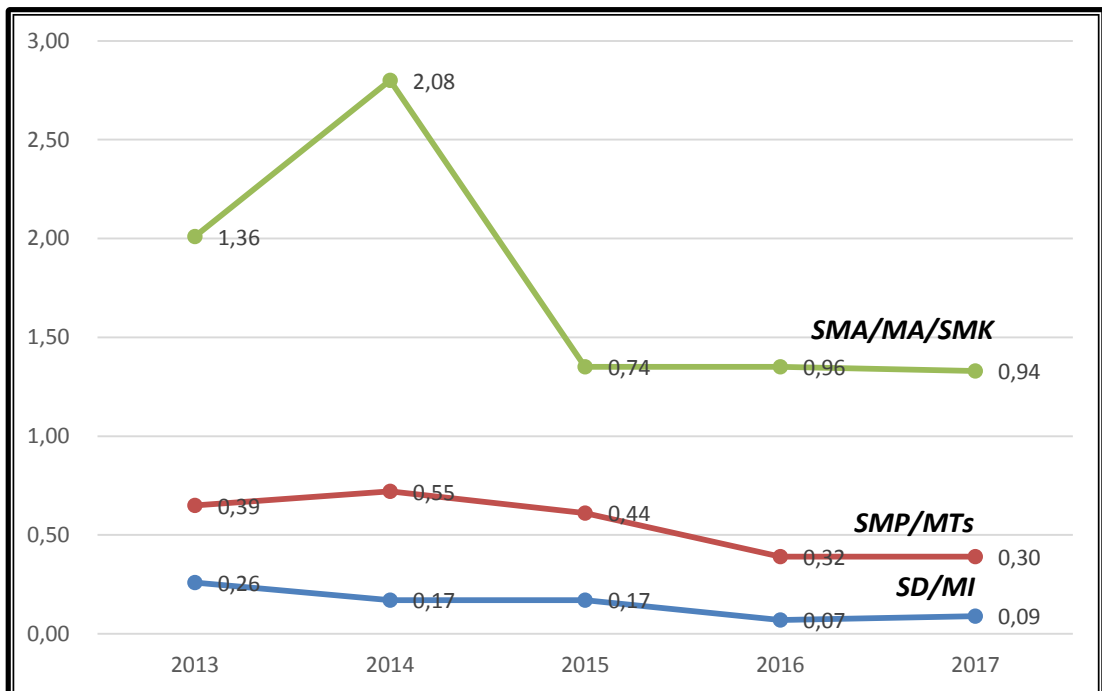
sekaligus sudah menggambarkan APM. Penghitungan jumlah siswa adalah berdasarkan lokasi satuan pendidikan, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah berdasarkan wilayah geografis.

Grafik III.3 memperlihatkan angka transisi atau angka melanjutkan ke SMP/ sederajat dan ke SMA/ sederajat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Angka Transisi sering disebut juga dengan Angka Melanjutkan, adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya. Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya =100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bila angkanya lebih dari 100% disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain. Digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Sebagaimana angka lulusan, angka transisi juga mengalami fluktuasi.

Angka transisi ke SMP/ Sederajat lebih stabil jika dibandingkan dengan angka transisi ke SMA/ Sederajat. Tingginya angka transisi ke SMP/ Sederajat dari pada angka transisi ke SMA/ sederajat disebabkan karena daya tampung untuk siswa baru kelas 7 di SMP/ Sederajat lebih besar dibandingkan dengan daya tampung untuk siswa baru kelas 10 SMA/ Sederajat, keberadaan lembaga pendidikan SMP/ MTs telah tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan, sedangkan keberadaan satuan pendidikan menengah belum merata. Beberapa kecamatan belum memiliki satuan pendidikan menengah formal yaitu kecamatan Bejen, kecamatan Tretep, kecamatan Kledung, dan kecamatan Tlogomulyo. Belum meratanya satuan pendidikan menengah formal berpengaruh terhadap APK Pendidikan menengah dari aspek mobilitas, biaya transportasi, dan biaya personal lainnya. Berdasarkan pengamatan biaya transportasi dan biaya personal lain pada umumnya lebih besar dari pada biaya operasional yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Grafik III.4 menunjukkan Angka Putus Sekolah SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ MA/ SMK selama 5 tahun terakhir. Angka Putus Sekolah (APtS) lazim disebut juga **Drop Out** (DO) adalah perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan

jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Makin rendah nilainya, berarti makin baik. Idealnya 0%, berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. Digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang. Siswa putus sekolah adalah siswa yang keluar dari satuan pendidikan tanpa membawa surat mutasi/pindah dan/atau surat keterangan lain.



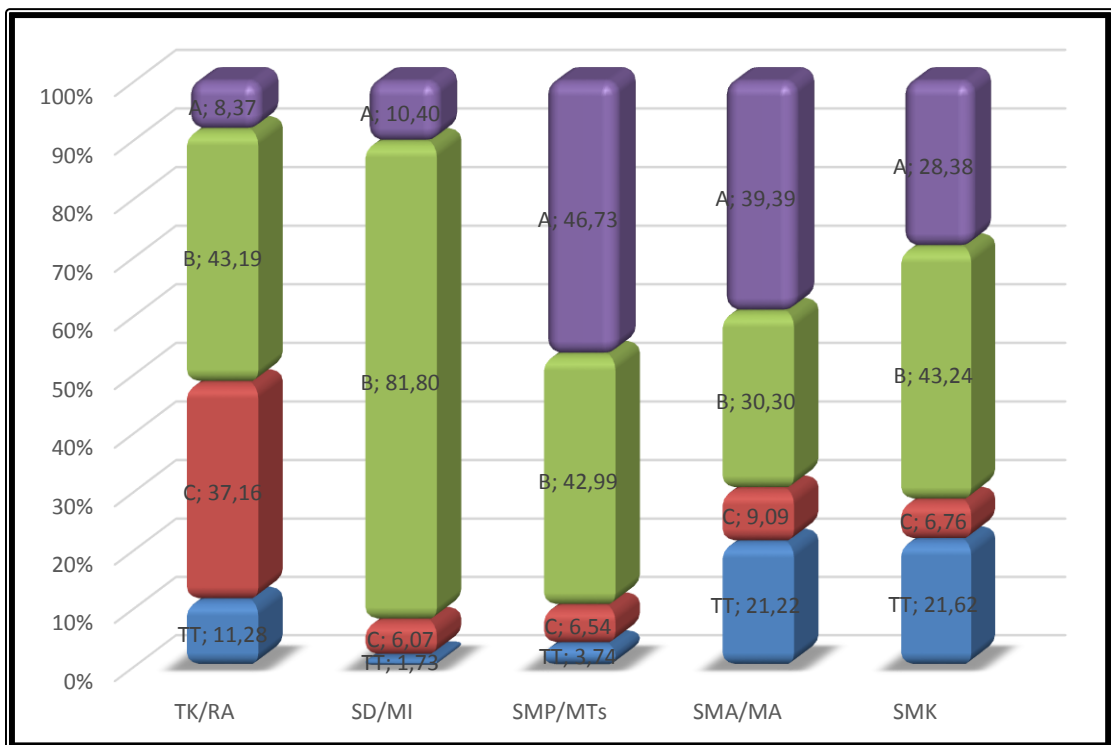
Grafik III.4
Angka Putus Sekolah (%)

Dalam kurun waktu 5 tahun semua jenjang menunjukkan rata-rata APtS yang semakin menurun yaitu dari 0,67% pada tahun 2013 menjadi 0,44% pada tahun 2017. Jika dibandingkan antarjenjang, maka jenjang SD/MI lebih rendah daripada jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Pada tahun 2017 APtS pada jenjang SD/MI sebesar 0,09%, sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 0,30% dan 0,94%.

Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari indikator APtS, maka mutu pendidikan pada jenjang SD/MI lebih baik dibandingkan dengan jenjang SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK. Sekalipun demikian jika dilihat dari angka absolutnya, maka pada jenjang SD/MI masih terdapat 66 siswa putus sekolah yang setara dengan 3,28 rombongan belajar, sedangkan pada SMP/MTs

sebesar 99 siswa yang setara dengan 3,22 rombongan belajar, dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 145 siswa setara dengan 4,85 rombongan belajar.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi APtS adalah mengurangi atau menghilangkan penyebab anak yang putus sekolah dikarenakan oleh berbagai faktor yaitu ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, faktor budaya, fasilitas belajar kurang, ketiadaan sekolah/sarana, dan karena anak berkebutuhan khusus. Masing-masing faktor membutuhkan solusi yang berbeda. Solusi faktor ekonomi berbeda dengan faktor minat dan seterusnya. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan melalui kerja sama semua unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing.



Grafik III.5
Jenjang Akreditasi TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK Tahun 2017 (%)

Grafik III.5 menunjukkan persentase jenjang akreditasi TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK tahun 2017. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 22). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

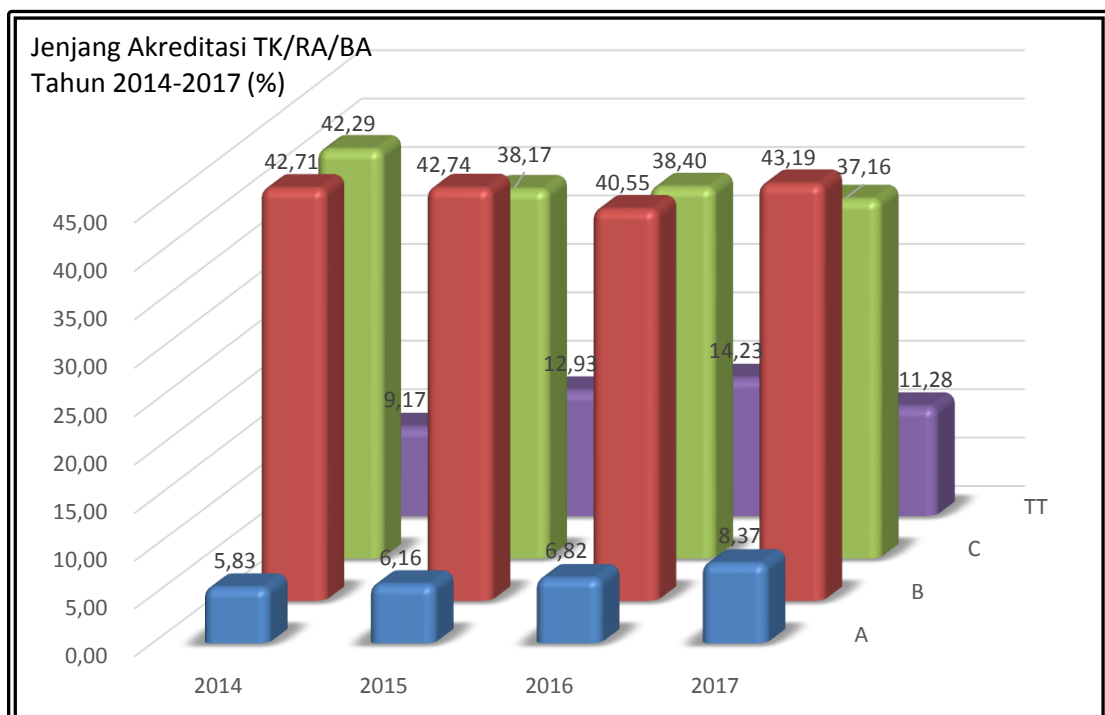
Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Di dalam pasal 2 ayat 1, lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat, khususnya calon orang tua siswa dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Bagi pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan Grafik III.5, jika dilihat dari segi kualitas pendidikan berdasarkan indikator % jenjang akreditasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Terakreditasi A lebih banyak pada SMP/MTs, dan paling sedikit

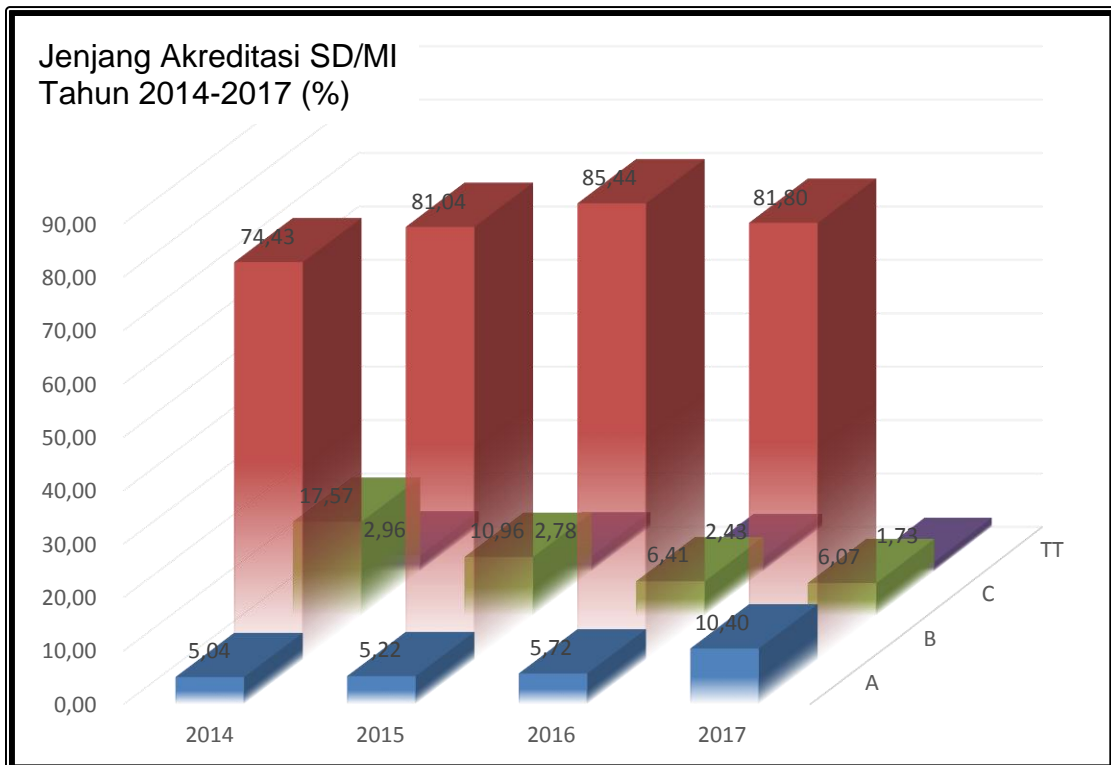
TK/RA/RA; 2) Terakreditasi B lebih banyak pada SD/MI, dan paling sedikit SMA/MA; 3) Terakreditasi C lebih banyak TK/RA/BA, dan paling sedikit SD/MI; dan 4) Tidak/Belum Terakreditasi (TT) lebih banyak SMK, dan paling sedikit jenjang SD/MI. Pemeringkatan satuan pendidikan berdasarkan nilai akreditasi: Terakreditasi A (Sangat Baik), nilai : 86-100; Terakreditasi B (Baik), dengan nilai: 71- 85; Terakreditasi C (Cukup Baik), nilai : 56-70; Tidak Terakreditasi nilai < 56. Perkembangan jenjang akreditasi selama 4 tahun terakhir terlihat pada Grafik III.6 s/d Grafik III.10 berikut:



Grafik III.6
Jenjang Akreditasi TK/RA/BA Tahun 2014 - 2017 (%)

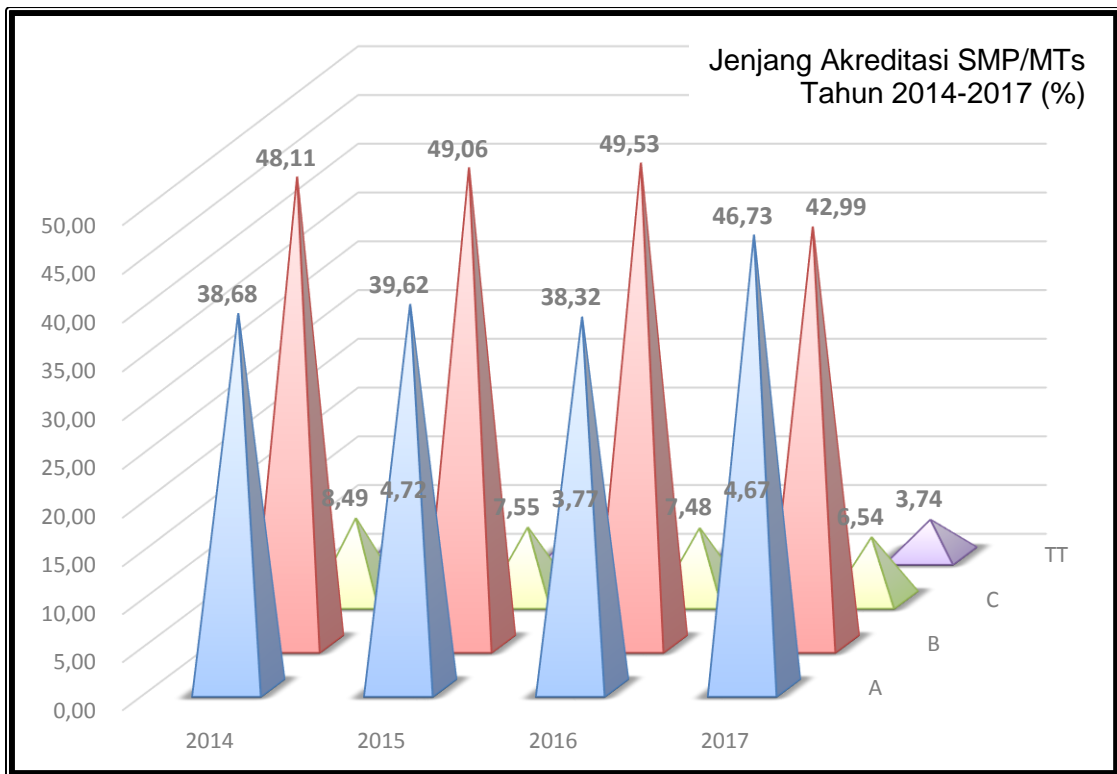
Berdasarkan Grafik III.6 TK/RA/BA terakreditasi A menunjukkan peningkatan dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014 TK/RA/BA terakreditasi A sebesar 5,83% meningkat menjadi 8,37% pada tahun 2017. Kemudian TK/RA/BA terakreditasi B menunjukkan prosentase tertinggi, diikuti terakreditasi C, dan belum/tidak terakreditasi. Prosentase TK/RA/BA yang belum/tidak terakreditasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang terakreditasi A. TK/RA/BA terakreditasi B menunjukkan peningkatan yaitu dari 42,71% pada tahun 2014 menjadi 43,19%. Demikian pula TK/RA/BA yang belum/tidak terakreditasi. Pada tahun 2014 TK/RA/BA belum terakreditasi sebanyak 9,17% menjadi 11,28% pada tahun 2017. Sedangkan yang terakreditasi C

menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014 TK/RA/BA yang terakreditasi C sebanyak 42,29% menjadi 37,16% pada tahun 2017.



Grafik III.7
Jenjang Akreditasi SD/MI Tahun 2014 - 2017 (%)

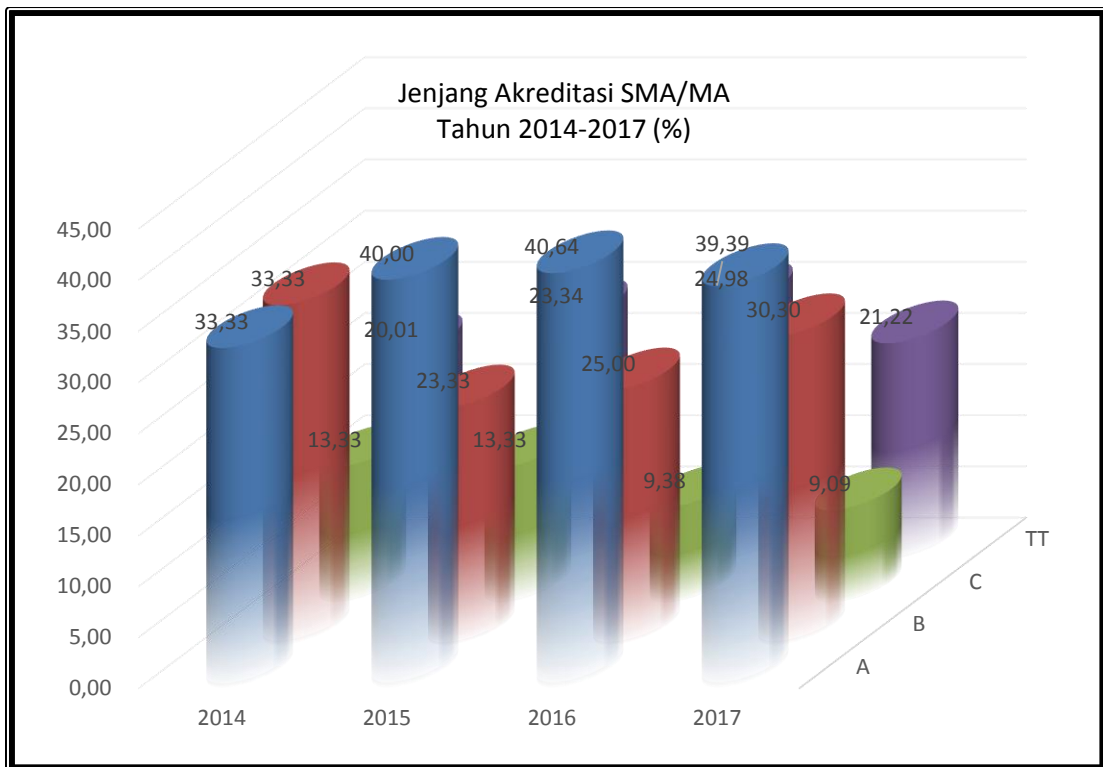
Berdasarkan Grafik III.7 SD/MI terakreditasi A menunjukkan peningkatan dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014 SD/MI terakreditasi A sebesar 5,04% meningkat menjadi 10,40% pada tahun 2017. SD/MI terakreditasi B menunjukkan prosentase tertinggi dan menunjukkan peningkatan yaitu dari 74,43% pada tahun 2014 menjadi 81,80% pada tahun 2017. Kemudian SD/MI terakreditasi C menunjukkan penurunan yaitu dari 17,57% pada tahun 2014 menjadi 6,07% pada tahun 2017, demikian pula SD/MI belum/tidak terakreditasi menunjukkan penurunan yaitu dari 2,96% pada tahun 2014 menjadi 1,73% pada tahun 2017. SD/MI belum/tidak terakreditasi menduduki prosentase paling rendah, sedangkan SD/MI terakreditasi B menduduki prosentasi paling tinggi. Prosentase SD/MI terakreditasi A lebih tinggi daripada SD/MI belum/tidak terakreditasi. Untuk mendorong SD/MI yang telah terakreditasi B menjadi terakreditasi A diperlukan peningkatan capaian nilai komponen-komponen akreditasi yang terdiri dari 8 standar pendidikan nasional hingga mencapai nilai A.



Grafik III.8
Jenjang Akreditasi SMP/MTs Tahun 2014 - 2017 (%)

Berdasarkan Grafik III.8 SMP/MTs terakreditasi A menunjukkan peningkatan dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014 SMP/MTs terakreditasi A sebesar 38,68% meningkat menjadi 46,73% pada tahun 2017. SMP/MTs terakreditasi B menunjukkan prosentase tertinggi kecuali pada tahun 2017, pada tahun tersebut prosentase tertinggi adalah terakreditasi A. Kemudian SMP/MTs terakreditasi C menunjukkan penurunan yaitu dari 8,49% pada tahun 2014 menjadi 6,54% pada tahun 2017, demikian pula SMP/MTs belum/tidak terakreditasi menunjukkan penurunan yaitu dari 4,72% pada tahun 2014 menjadi 3,74% pada tahun 2017. Secara rata-rata selama 4 tahun SMP/MTs belum/tidak terakreditasi menduduki prosentase paling rendah, sedangkan SMP/MTs terakreditasi B menduduki prosentasi paling tinggi.

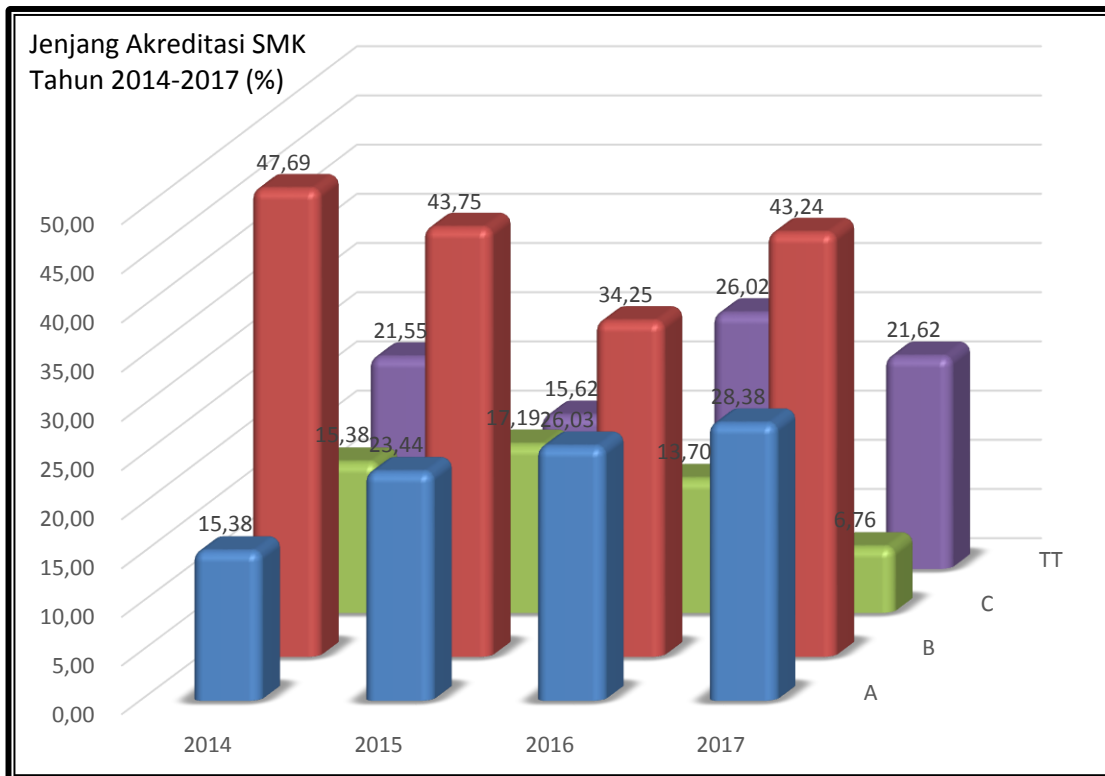
Dengan demikian peluangnya cukup besar untuk dapat menaikkan prosentase SMP/MTs terakreditasi A yaitu dengan cara mendorong SMP/MTs yang telah terakreditasi B untuk meningkatkan nilai komponen-komponen akreditasi yang terdiri dari 8 standar pendidikan nasional hingga mencapai nilai kategori terakreditasi A secara bertahap.



Grafik III.9
Jenjang Akreditasi SMA/MA Tahun 2014 - 2017 (%)

Berdasarkan Grafik III.9 SMA/MA terakreditasi A menunjukkan peningkatan dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014 SMA/MA terakreditasi A sebesar 33,33% meningkat menjadi 39,39% pada tahun 2017. SMA/MA terakreditasi B menunjukkan prosentase tertinggi dan semakin menurun yaitu dari 33,33% pada tahun 2014 menjadi 30,30% pada tahun 2017, kemudian terakreditasi A menduduki urutan kedua. SMA/MA terakreditasi C menunjukkan penurunan yaitu dari 13,33% pada tahun 2014 menjadi 9,09% pada tahun 2017, sedangkan SMA/MA belum/tidak terakreditasi menunjukkan peningkatan yaitu dari 20,01% pada tahun 2014 menjadi 21,22% pada tahun 2017. Secara rata-rata selama 4 tahun SMA/MA terakreditasi C menduduki prosentase paling rendah, sedangkan SMA/MA terakreditasi B menduduki prosentase paling tinggi.

Dengan demikian peluangnya cukup besar untuk dapat menaikkan prosentase SMA/MA terakreditasi A yaitu dengan cara mendorong SMA/MA yang telah terakreditasi B untuk meningkatkan nilai komponen-komponen akreditasi yang terdiri dari 8 standar pendidikan nasional hingga mencapai nilai kategori terakreditasi A secara bertahap.

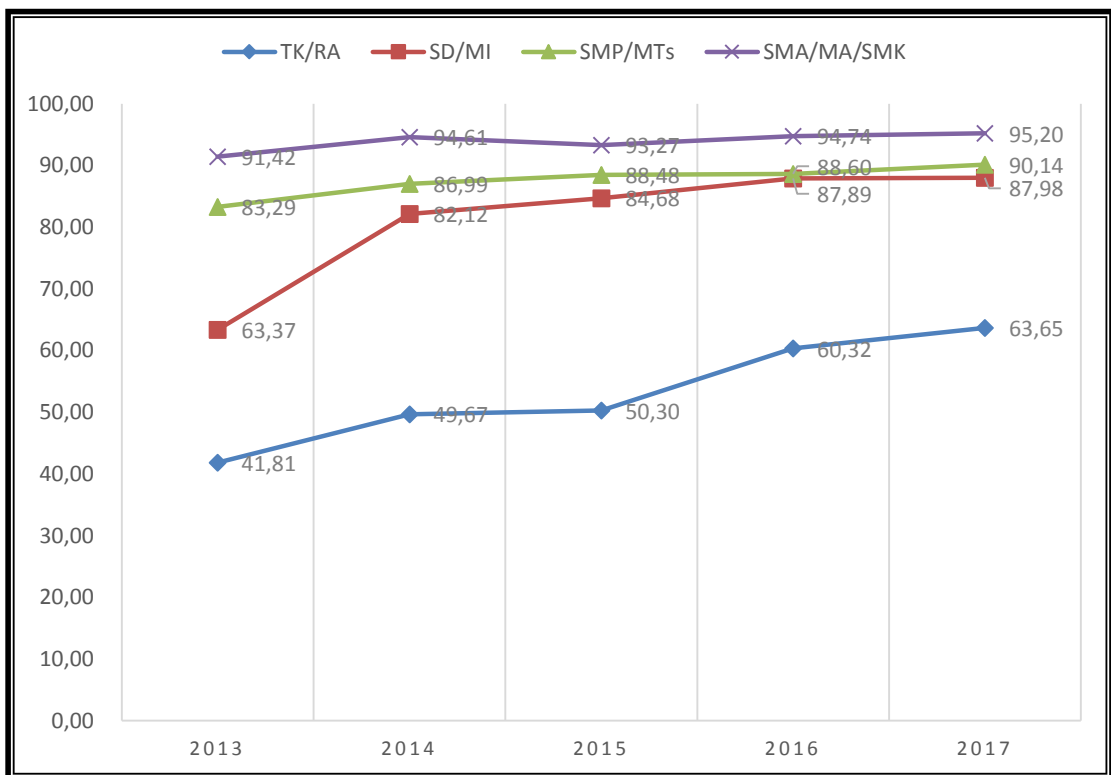


Grafik III.10
Jenjang Akreditasi SMK Tahun 2014 - 2017 (%)

Berdasarkan Grafik III.10 SMK terakreditasi A menunjukkan peningkatan dalam waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014 SMK terakreditasi A sebesar 15,38% meningkat menjadi 28,38% pada tahun 2017. SMK terakreditasi B menunjukkan prosentase tertinggi dan semakin menurun yaitu dari 47,69% pada tahun 2014 menjadi 43,24% pada tahun 2017, kemudian terakreditasi A menduduki urutan kedua. SMK terakreditasi C menunjukkan penurunan yaitu dari 13,33% pada tahun 2014 menjadi 9,09% pada tahun 2017, sedangkan SMK belum/tidak terakreditasi menunjukkan peningkatan yaitu dari 21,55% pada tahun 2014 menjadi 21,62% pada tahun 2017. Secara rata-rata selama 4 tahun SMK terakreditasi C menduduki prosentase paling rendah, sedangkan SMK terakreditasi B menduduki prosentase paling tinggi.

Dengan demikian peluangnya cukup besar untuk dapat menaikkan prosentase SMK terakreditasi A yaitu dengan cara mendorong SMK yang telah terakreditasi B untuk meningkatkan nilai komponen-komponen akreditasi yang terdiri dari 8 standar pendidikan nasional hingga mencapai nilai kategori terakreditasi A secara bertahap.

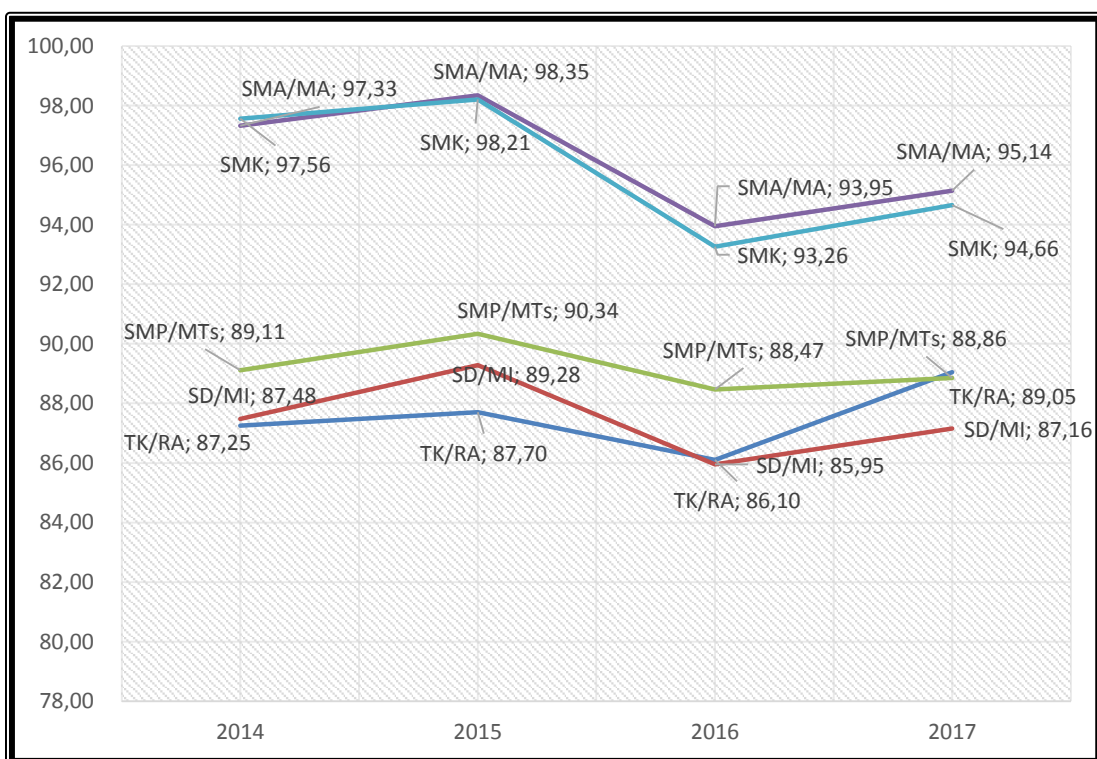
Grafik III.11 menunjukkan perkembangan persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK selama 4 tahun terakhir. Persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik adalah perbandingan antara jumlah guru (pendidik) yang memiliki ijazah \geq S1/D4 dengan jumlah guru seluruhnya. Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik secara makro sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, yaitu untuk semua jenjang TK sampai SMK adalah lulusan \geq S1/D4. Makin tinggi nilainya berarti akan makin baik mutu sekolah tersebut dipandang dari sudut guru. Nilai idealnya =100% berarti semua guru memenuhi standar kualifikasi akademik.



Grafik III.11
Pendidik memenuhi Standar Kualifikasi Akademik (%)

Persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik digunakan untuk mengetahui banyaknya jumlah pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik, dan untuk menentukan kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan atau kualifikasi guru. Dalam kurun waktu tersebut persentase pendidik yang memenuhi standar

kualifikasi akademik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama kurun waktu tahun 2013 s/d 2017 pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4 seluruh jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 69,97% pada tahun 2013 menjadi 84,24% pada tahun 2017, dengan jenjang SMK memiliki pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4 paling tinggi yaitu 95,20% dibandingkan dengan jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA. Hal ini berarti bahwa berdasarkan indikator pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik, kualitas pendidikan pada jenjang SMK lebih baik dibandingkan dengan jenjang lainnya.



Grafik III.12
Ruang Kelas Kondisi Baik (%)

Grafik III.12 menunjukkan perkembangan persentase ruang kelas yang kondisinya baik pada jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK selama 4 tahun terakhir. Persentase ruang kelas yang kondisinya baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisinya baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya =100% berarti semua ruang kelas dalam kondisi

baik. Digunakan untuk mengetahui banyaknya ruang kelas baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi sekolah di suatu daerah dan/atau satuan pendidikan.

Kondisi ideal ruang kelas kondisi baik 100% sulit sekali dicapai karena banyaknya jumlah ruang kelas, dan ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran untuk merehabilitasi ruang kelas yang rusak ringan maupun rusak berat sehingga rehabilitasi ruang kelas di suatu satuan pendidikan sedang dikerjakan, di satuan pendidikan lain ruang kelas yang tadinya baik sudah berubah menjadi rusak ringan maupun berat. Disamping itu gangguan cuaca juga berpengaruh terhadap kondisi ruang kelas.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir persentase ruang kelas yang kondisinya baik mengalami penurunan. Secara rata-rata semua jenjang pendidikan ruang kelas yang kondisinya baik pada tahun 2014 sebesar 91,75% menjadi 90,97% pada tahun 2017. Sedangkan apabila dibandingkan antarjenjang, maka SD/MI memiliki ruang kelas kondisi baik paling rendah, kemudian TK/RA dan yang paling tinggi jenjang SMA/MA. Pada tahun 2017 jenjang SMA/MA dan SMK memiliki persentase ruang kelas kondisi baik lebih tinggi yaitu 95,14% dan 94,66% dari pada jenjang TK/RA/BA, SD/MI, maupun SMP/MTs. Hal ini berarti bahwa dipandang dari indikator ruang kelas yang kondisinya baik, kualitas pendidikan pada jenjang SMA/MA, dan SMK lebih baik dibandingkan dengan jenjang lainnya.

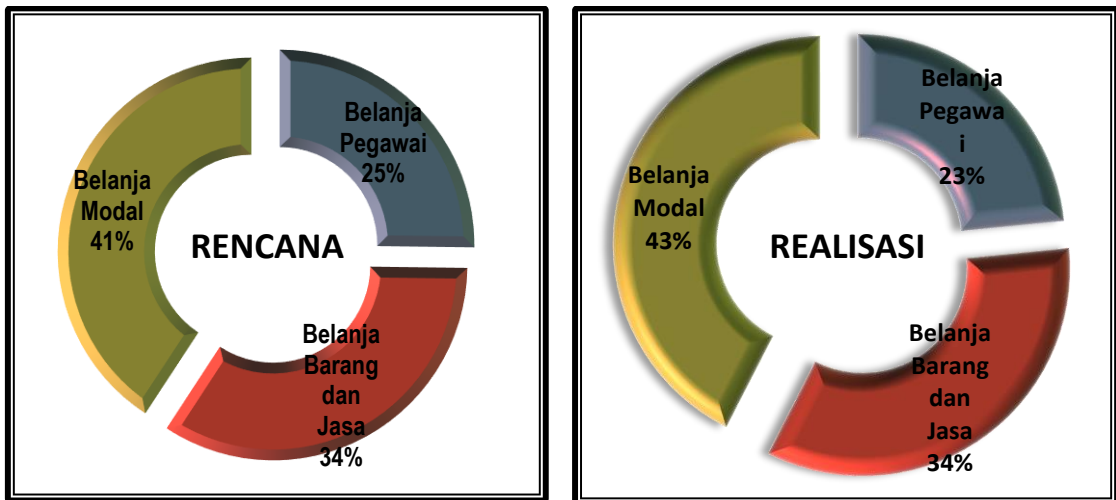
B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2017, didukung dengan Anggaran Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp 120.716.234.721,00 bersumber dari Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan, dan Dana Alokasi Khusus, dengan rincian:

1. Belanja Pegawai : Rp 30.429.859.471,00 (25,21%);
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp 41.092.754.941,00 (34,04%);
3. Belanja Modal : Rp 49.193.620.309,00 (40,75%).

Realisasi Belanja Langsung berjumlah Rp 110.071.085.432 (*Seratus sepuluh milyar tujuh puluh satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai : Rp 25.784.952.896,00 (23,43%);
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp 37.501.209.402,00 (34,07%);
3. Belanja Modal : Rp 46.784.923.134,00 (42,50%).



Komposisi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

Realisasi Belanja Langsung masing-masing program dan kegiatan bervariasi sebagaimana tersebut dalam tabel Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017, yang dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran strategis sebagaimana Tabel III.20 sebagai berikut :

Tabel III.21
REALISASI BELANJA LANGSUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan	100,00	Jumlah	346.970.000	332.081.250	95,71
		Program pendidikan anak usia dini	187.400.000	179.992.000	96,05
		1. Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa	55.800.000	52.200.000	93,55
		2. Seminar/workshop tentang APE tradisional Jawa bernuansa seni	20.000.000	19.760.000	98,80
		3. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	65.100.000	62.747.000	96,39
		4. Pengadaan buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tatakrama atau nilai budaya daerah atau keteladanan TK/RA	46.500.000	45.285.000	97,39
		Program wajar dikdas sembilan tahun	97.370.000	92.139.250	94,63
		1. Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	34.820.000	33.934.250	97,46
		2. Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil	30.000.000	29.140.000	97,13
		3. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	32.550.000	29.065.000	89,29
		Program pendidikan nonformal	62.200.000	59.950.000	96,38
		1. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa pendidikan nonformal	37.200.000	37.200.000	100,00
		2. Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah	25.000.000	22.750.000	91,00

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini	99,95	Program pendidikan anak usia dini	219.334.000	215.149.670	98,09
		1. Pengembangan pendidikan anak usia dini	14.994.000	14.994.000	100,00
		2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK non Fisik)	181.200.000	177.015.670	97,69
		3. Penunjang DAK Non Fisik PAUD	23.140.000	23.140.000	100,00
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar	98,56	Program wajar dikdas sembilan tahun	64.857.165.235	60.040.733.599	92,57
		1. Kegiatan BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	43.152.728.591	39.687.871.045	91,97
		2. Kegiatan BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	19.343.232.650	18.043.761.587	93,28
		3. Fasilitasi kegiatan BOS SD	115.850.000	68.048.400	58,74
		4. Fasilitasi kegiatan BOS SMP	37.010.000	36.192.500	97,79
		5. Sisa Kegiatan BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	1.149.781.300	1.147.997.373	99,84
		6. Sisa Kegiatan BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.058.562.694	1.056.862.694	99,84
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah	99,27	Program pendidikan menengah	0	0	0
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal	97,78	Program pendidikan nonformal	609.480.000	594.080.000	97,47
		1. Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP	120.735.000	110.705.000	91,69
		2. Pendampingan PNF	25.000.000	21.790.000	87,16
		3. Penyelenggaraan PKBM	155.715.000	154.625.000	99,30
		4. Peningkatan pendidikan masyarakat	138.800.000	138.780.000	99,99
		5. Penyelenggaraan pendidikan paket C	169.230.000	168.180.000	99,38

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	95,96	Program pendidikan anak usia dini	127.050.000	119.637.000	94,17
		1. Penguatan Organisasi Mitra PAUD	55.550.000	50.475.000	90,86
		2. Penyelenggaraan gebyar PAUD	46.500.000	44.162.000	94,97
		3. Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi	25.000.000	25.000.000	100,00
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	99,46	Jumlah	3.918.461.000	3.443.948.541	87,89
		Program wajar dikdas sembilan tahun	3.015.761.000	2.591.848.011	85,94
		1. Pelaksanaan Prog MBS dan Lomba-lomba SD	48.620.000	44.780.000	92,10
		2. Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP	39.475.000	23.139.000	58,62
		3. Pelaksanaan lomba Perpust dan Gugus SD	17.500.000	16.960.000	96,91
		4. Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	56.750.000	53.222.000	93,78
		5. Sosialisasi Kurikulum 2013	61.900.000	46.854.000	75,69
		6. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) SD	60.000.000	60.000.000	100,00
		7. Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs	744.658.500	642.913.550	86,34
		8. Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP	49.325.000	49.225.000	99,80
		9. UAS/EHB SD/MI	949.332.500	779.246.161	82,08
		10. Pembangunan perpustakaan sekolah	350.000.000	342.500.000	97,86
		11. Pemberian makanan tambahan anak sekolah	75.000.000	74.400.000	99,20
12. Implementasi Kurikulum 2013	100.000.000	91.691.400	91,69		

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		13. Pendidikan lalulintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta	463.200.000	366.916.900	79,21
		Program manajemen pelayanan pendidikan	902.700.000	852.100.530	94,39
		1. Lomba Sekolah Sehat TK, SMP, dan SMA	46.500.000	43.812.000	94,22
		2. Akreditasi di Sekolah Madrasah (MI, MTs, MA)	75.000.000	74.479.950	99,31
		3. POPDA SD, SMP dan SMA	241.800.000	240.781.000	99,58
		4. Festival dan Lomba Seni Siswa	51.150.000	39.850.000	77,91
		5. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB Online)	116.250.000	116.250.000	100,00
		6. Pameran Pendidikan	372.000.000	336.927.580	90,57
Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	94,71	Program pendidikan menengah	0	0	0
Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal	100,00	Program pendidikan nonformal	329.627.000	261.656.900	79,38
		1. Fasilitasi akreditasi lembaga PNF	136.460.000	119.274.500	87,41
		2. Fasilitasi pendidikan kesetaraan	20.000.000	15.170.000	75,85
		3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C	153.707.000	111.151.500	72,31
		4. Fasilitasi pendidikan masyarakat	19.460.000	16.060.900	82,53
Terpenuhinya kebutuhan pendidik	100,00	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	15.205.973.000	11.298.646.500	74,30
		1. Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	37.000.000	36.088.000	97,54
		2. Fasilitasi bantuan tenaga pendidik	8.590.000	8.285.500	96,46
		3. BOS Daerah (Peningkatan Mutu)	15.160.383.000	11.254.273.000	74,23

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik	98,51	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
Meningkatnya profesionalisme pendidik	98,47	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	936.306.700	715.362.150	76,40
		1. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	83.700.000	14.138.000	16,89
		2. Seleksi guru berprestasi	69.750.000	51.115.100	73,28
		3. Pelaksanaan sertifikasi pendidik	88.350.000	83.748.000	94,79
		4. Seleksi Kepala Sekolah	88.330.500	56.246.600	63,68
		5. Pelaksanaan program diklat tenaga kependidikan	15.000.000	11.788.600	78,59
		6. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	8.787.500	8.537.000	97,15
		7. Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan	129.819.750	115.118.800	88,68
		8. Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG	83.699.950	78.014.700	93,21
		9. Diklat Calon Kepala Sekolah	93.023.000	78.322.000	84,20
		10. Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan secara Nasional	93.000.000	88.759.350	95,44
		11. Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidik TK, SD, SMP, SMA dan SMK	45.028.000	44.215.000	98,19
		12. Diklat kepala sekolah	137.818.000	85.359.000	61,94
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan	72,22	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	343.556.000	273.883.175	79,72
		1. Bintek Peningkatan Kapasitas kerja Karyawan	45.812.000	44.816.000	97,83

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		2. Diklat kompetensi pengawas sekolah	27.620.000	26.759.500	96,88
		3. Penerbitan jurnal pendidikan	46.500.000	44.304.100	95,28
		4. Operasional Pengawas SMP/SMA/SMK	79.050.000	43.838.825	55,46
		5. Bintek peningkatan kompetensi penilik	18.076.000	13.606.000	75,27
		6. Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru	37.200.000	18.612.000	50,03
		7. Penguatan lembaga pendidikan swasta	27.798.000	23.965.750	86,21
		8. Bimbingan Teknik Calon Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Guru dan Calon Sekretariat Tim PAK Guru	15.000.000	11.781.000	78,54
		9. Penyelenggaraan Porseni guru TK	46.500.000	46.200.000	99,35
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	100,00	Program pendidikan anak usia dini	818.400.000	808.085.000	98,74
		1. Rehabilitasi Gedung TK Negeri	83.700.000	82.322.000	98,35
		2. Pembangunan Pagar Keliling TK	83.700.000	82.886.000	99,03
		3. Penyelesaian RKB TK negeri	279.000.000	273.795.000	98,13
		4. Pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD terpadu	372.000.000	369.082.000	99,22
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar	99,55	Program wajar dikdas sembilan tahun	19.346.495.886	19.119.908.141	98,83
		1. DAK SD	8.370.841.000	8.370.841.000	100,00
		2. Penunjang DAK SD	127.000.000	34.357.000	27,05
		3. DAK SMP	649.000.000	644.999.200	99,38
		4. Sisa DAK SMP	4.479.654.886	4.454.021.441	99,43

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		5. Fasilitasi DAK SMP	20.000.000	13.355.000	66,78
		6. Sanitasi SMP	300.000.000	296.807.000	98,94
		7. Pembangunan penampung air bersih	200.000.000	170.800.000	85,40
		8. Pembangunan ruang penunjang lain	500.000.000	478.644.000	95,73
		9. Pembangunan rabat/selasar	200.000.000	195.002.000	97,50
		10. Pembangunan, rehabilitasi, dan sarana prasarana SD	4.000.000.000	3.974.868.500	99,37
		11. Pembangunan, rehabilitasi, dan sarana prasarana SMP	500.000.000	486.213.000	97,24
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah	94,20	Program pendidikan menengah	0	0	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal	99,99	Program pendidikan nonformal	0	0	0
Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga	67,63	Jumlah	10.048.889.000	9.525.242.400	94,79
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	427.570.000	225.555.900	52,75
		1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan	35.000.000	27.566.900	78,76
		2. Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP, dan diklat	29.730.000	25.913.500	87,16
		3. Peningkatan kapasitas siswa didik	362.840.000	172.075.500	47,42
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	293.239.000	269.185.600	91,80
		1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	65.000.000	63.208.000	97,24
		2. Penyelenggaraan kompetisi olahraga	40.000.000	30.979.000	77,45
		3. Pengiriman kejuaraan daerah Haornas dan HSP	124.175.000	120.919.600	97,38

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		4. Porseni pondok pesantren	39.760.000	35.974.000	90,48
		5. Pengiriman calon pelatih olahraga dan pemuda	24.304.000	18.105.000	74,49
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	9.328.080.000	9.030.500.900	96,81
		1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	50.000.000	44.321.075	88,64
		2. Pemeliharaan rutin/berkala stadion Bhumi Phala	83.800.000	78.666.025	93,87
		3. Pengadaan sarana prasarana mess atlet	700.000.000	676.014.750	96,57
		4. Pembangunan kawasan olahraga terpadu (Ban-Keu)	7.000.000.000	6.779.925.000	96,86
		5. Fasilitasi pembangunan kawasan olahraga terpadu	494.280.000	486.595.550	98,45
		6. Pembangunan kawasan olahraga terpadu	1.000.000.000	964.978.500	96,50
		Program pelayanan administrasi perkantoran	1.189.150.900	1.053.719.006	88,61
		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	465.000.000	380.374.321	81,80
		2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.100.000	64.939.386	99,75
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.549.500	27.289.800	99,06
		4. Penyediaan alat tulis kantor	203.900.000	203.881.900	99,99
		5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.499.900	41.820.600	89,94
		6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.315.000	77,17
		7. Penyediaan makanan dan minuman	42.900.000	37.500.500	87,41

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	74.400.000	74.039.134	99,51
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	158.100.000	139.171.000	88,03
		10. Jasa Pelayanan perkantoran	77.701.500	57.387.365	73,86
		11. Pendampingan dapodik	25.000.000	25.000.000	100,00
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.343.900.000	2.238.755.600	95,51
		1. Pembangunan gedung kantor	418.500.000	372.955.000	89,12
		2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	279.000.000	271.026.000	97,14
		3. Pengadaan peralatan gedung kantor	186.000.000	177.842.000	95,61
		4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	232.500.000	225.960.500	97,19
		5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.900.000	27.397.100	98,20
		6. Pembangunan aula SMP 1 Temanggung	1.200.000.000	1.163.575.000	96,96
		Program perencanaan pembangunan daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
		1. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	2.000.000	2.000.000	100,00
		Program penataan peraturan perundang-undangan	25.000.000	24.580.500	98,32
		1. Review Perda Pendidikan	25.000.000	24.580.500	98,32
RATA-RATA	95,79	JUMLAH	120.716.234.721	110.071.085.432	91,18

Tabel III.22
REALISASI BELANJA LANGSUNG SETIAP PROGRAM

No	Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Rp	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1.189.150.900	1.053.719.006	88,61	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	2.343.900.000	2.238.755.600	95,51	
3	Program pendidikan anak usia dini	14	1.378.630.000	1.349.249.670	97,87	
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	34	87.328.122.121	81.848.299.001	93,73	
5	Program Pendidikan Non Formal	13	1.058.507.000	935.446.900	88,37	
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22	16.439.335.700	12.241.691.825	74,47	
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6	902.700.000	852.100.530	94,39	
8	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	3	427.570.000	225.555.900	52,75	
9	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	5	293.239.000	269.185.600	91,80	
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	6	9.328.080.000	9.030.500.900	96,81	
11	Program perencanaan pembangunan daerah	1	2.000.000	2.000.000	100,00	
12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	25.000.000	24.580.500	98,32	
JUMLAH		Tahun 2017	122	120.716.234.721	110.071.085.432	91,18
		Tahun 2016	159	65.738.033.643	38.388.814.169	58,40
		Tahun 2015	179	70.283.518.678	61.742.419.631	87,85
		Tahun 2014	114	53.878.052.450	37.180.315.957	69,01

Anggaran Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp. 120.716.234.721,00 (*Seratur dua puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*) terserap sebesar Rp. 110.071.085.432,00 (*Seratus sepuluh milyar tujuh puluh satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) atau sebesar **91,18 %**. Program yang dijalankan sebanyak 12 terbagi dalam 122 kegiatan. Dua kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu *Seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB*, dan *Pengadaan buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tatakrama atau nilai budaya daerah atau keteladanan pendidikan nonformal*. Kegiatan-kegiatan yang

belum terlaksana pada tahun anggaran 2017, jika ada aturan pelaksanaannya maka akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Serapan anggaran Belanja Langsung tahun 2017 merupakan serapan yang paling tinggi selama 4 tahun terakhir. Serapan anggaran Belanja Langsung tahun 2016 sebesar 58,40%, tahun anggaran 2015 sebesar 87,85%; dan tahun anggaran 2014 sebesar 69,01%.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikategorikan berhasil, karena rata-rata target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata kategori Baik. Hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel IV.1
% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2014-2017

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja				Kategori (2017)
		2014	2015	2016	2017	
1	Meningkatnya budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya Jawa serta keteladanan	99,51	99,99	99,99	100,00	Baik
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini	99,91	99,56	99,74	99,95	Baik
3	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar	99,04	99,45	98,25	98,56	Baik
4	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah	99,56	99,98	98,96	99,27	Baik
5	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal	99,95	95,58	97,41	97,78	Baik
6	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	94,04	96,75	95,25	95,96	Baik
7	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	90,99	90,69	89,75	99,46	Baik
8	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	89,42	89,57	86,85	94,71	Baik
9	Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal	95,21	100,00	100,00	100,00	Baik

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja				Kategori (2017)
		2014	2015	2016	2017	
10	Terpenuhinya kebutuhan pendidik	99,46	100,00	96,47	100,00	Baik
11	Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik	99,94	100,00	99,99	98,51	Baik
12	Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	93,38	95,27	98,04	98,47	Baik
13	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan	86,41	75,00	73,75	72,22	Cukup
14	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	99,88	100,00	99,50	100,00	Baik
15	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar	99,85	99,48	98,80	99,55	Baik
16	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah	96,97	99,43	95,76	94,20	Baik
17	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal	99,81	99,94	100,00	99,99	Baik
18	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga				67,37	Cukup
	Rata-rata	96,96	96,51	95,79	95,33	Baik

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;
2. Meningkatkan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
3. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak usia dini;
4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar;
5. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan nonformal;
6. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar;
8. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal;
9. Pemenuhan kebutuhan pendidik;
10. Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik;

11. Meningkatkan profesionalisme pendidik;
12. Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan;
13. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
15. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal;
16. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya optimal untuk mencapai target sesuai target kinerja yang telah tersusun.

Kami menyadari masih ada beberapa sasaran strategis yang belum dapat mencapai target. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini. Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mencapai target kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, 2 Pebruari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun LKjIP
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019
5. Tabel Pengukuran Kinerja
6. Daftar Prestasi